

**PELAYANAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERMANEN DI KOTA MAKASSAR
(Kasus Yayasan Taka Bonerate dan Yayasan Kartika Sejahtera)**

**BADARUDDIN ABDULLAH
P1601205507**



**PROGRAM SOSIOLOGI PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

TESIS

**PELAYANAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN
DI KOTA MAKASSAR
(Kasus Yayasan Taka Bonerate dan Yayasan Kartika Sejahtera)**

Disusun dan diajukan oleh :

**BADARUDDIN ABDULLAH
NOMOR POKOK : P1601205507**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 09 Januari 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat

Prof. T.R. Andi Lolo, Ph.D

Ketua

Dr. Hj. Bachrah Dafrid, MS

Anggota

Ketua Program Studi
Sosiologi

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. T.R. Andi Lolo, Ph.D

Prof.Dr.dr.Abdul Razak Thaha, M.Sc

**PELAYANAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERMANEN
DI KOTA MAKASSAR
(Kasus Yayasan Taka Bonerate dan Yayasan Kartika Sejahtera)**

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Sosiologi
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Disusun dan Diajukan oleh

BADARUDDIN ABDULLAH

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Badaruddin Abdullah

Nomor Mahasiswa : P1601203514

Program Studi : Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2008

Yang menyatakan

Badaruddin Abdullah

PRAKATA

Dari lubuk hati penulis yang paling dalam, puji syukur kepada-MU Allahuma Ya Rabbi, yang tak henti-hentinya mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh alam semesta, begitupula dengan junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Dienul Islam sebagai rahmatan lilalamin , sebab karenanya semata, semuanya ini dapat terjadi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, dengan judul Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen di Kota Makassar (Kasus Yayasan Taka Bonerate dan Yayasan Kartika Sejahtera)

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini, telah memperoleh bantuan, dukungan, bimbingan dan petunjuk dari pihak-pihak tertentu, baik dalam bentuk materil maupun moril. Oleh karena itu dengan hati yang tulus, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin beserta stafnya.
2. Bapak Prof. T.R. Andi Lolo, Ph.D selaku ketua Program Studi Sosiologi dan sebagai ketua penasihat dan Ibu Dr.Bachrah Dafrid, yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran untuk membimbing dan memberi petunjuk dan arahan kepada penulis.
3. Kepada ibu Dr. Maria E Pandu, MA, Bapak Dr. Mahmud Tang, MA, Dr. Tatjong Mappawata selaku dosen penguji yang juga telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian.

4. Kepada rekan-rekan dari rekanan yang turut membantu baik langsung maupun tidak langsung.
5. Kepada rekan-rekan pada Dinas Kesos dan Linmas propinsi Sulawesi Selatan, rekan-rekan dari instansi vertikal departemen sosial kota Makassar yang telah memberikan dorongan dan motivasi.
6. Seluruh informan dan responden yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan selama penelitian ini.
7. Kepada segenap handai tolan dan semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Secara khusus kepada keluarga di rumah, Ibu dan anak-anakku yang telah memberikan dorongan dan doa yang tak henti-hentinya untuk kesuksesan penulis dalam menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran atau masukan dari semua pihak demi perbaikan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dengan segala kekurangannya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, Januari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pelayanan	9
B. Kriteria Pelayanan Masyarakat	14
C. Konsep Partisipasi.....	20
D. Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat	24
E. Ruang Lingkup Jaminan Sosial.....	31
F. Pengertian Jaminan Sosial	34
G. Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen	37
H. Manajemen Pengelolaan BKSP.....	35
I. Kerangka Pikir Penelitian.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	50
C. Teknik Penentuan Informan.....	50
D. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analisis Data	52
F. Konsep Operasional.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
1. Profil Yayasan Sosial.....	56
2. Kondisi Demografis	59
B. Fungsi Organisasi Pengelola BKSP	61
1. Pendampingan Sosial Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin	61
2. Jenis Pendamping	66
3. Kegiatan Organisasi Pengelola BKSP.....	71
4. Peranan Organisasi Pengelola BKSP.....	73
5. Manfaat Organisasi Pengelola BKSP	76
C. Faktor Pendukung Pengelolaan BKSP	79
1. Partisipasi Masyarakat	79
2. Transparansi	84
3. Kebijakan dan Strategi.....	86
4. Data dan Informasi	88
Faktor Penghambat Pengelolaan BKSP.....	92
1. Ketenagaan.....	92
2. Mekanisme Kerja Organisasi/Yayasan Sosial.....	94
3. Pendanaan Organisasi Sosial.....	96
4. Pembinaan.....	96
D. Hasil Program BKSP.....	98
1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Hidup sasaran BKSP	99
2. Terlembaganya Kegiatan Penyantunan Masyarakat.....	100
3. Meningkatnya Kepedulian Kesetiakawanan/sosial.....	101
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	104
B. Saran	105

Lampiran

ABSTRAK

BADARUDDIN ABDULLAH : Pelayanan bantuan kesejahteraan sosial permanen di Kota Makassar (Kasus Yayasan Taka Bonerate dan Yayasan Kartika Sejahtera) di bimbing oleh T.R. Andi Lolo dan Bachrah Dafrid.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan fungsi organisasi pengelola bantuan kesejahteraan sosial permanen, menjelaskan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelayanan dan pengelolaan bantuan kesejahteraan sosial permanen, menjelaskan hasil yang diperoleh dari bantuan kesejahteraan sosial permanen.

Hasil Penelitian menunjukkan organisasi pengelola Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen yayasan Taka Bonerate dan yayasan Kartika Sejahtera telah menjalankan fungsinya sebagai pendampingan sosial yang merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat miskin. Pendampingan sosial hadir sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dari pengelolaan BKSP ini antara lain : a) Partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial dari masyarakat b) Transparansi. c) Kebijakan dan strategi diarahkan pada upaya membangun daya para penerima manfaat program, sedangkan yang menjadi faktor penghambat ialah : a) Kualitas sumber daya manusia pengelola masih minim, b). Mekanisme kerja / tata kelola organisasi atau yayasan yang belum mapan, c) pendanaan, d) Masih minimnya pembinaan yang dilakukan terhadap organisasi sosial ini. Hasil yang diperoleh dari program bantuan kesejahteraan sosial permanen ini adalah ; a) Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sasaran BKSP, sehingga dapat memelihara taraf kesejahteraan sosial, b) Terlembaganya kegiatan penyantunan berbasis masyarakat, c) Meningkatnya kepedulian sosial/kesetiakawanan sosial dari masyarakat khususnya dalam penanganan PMKS nonpotensial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, di antaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat.

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi hak dasar warga Negara, memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat sesuai dengan martabat kemanusiaan serta bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak.

Dengan adanya amanat tersebut maka penanggulangan kemiskinan haruslah dijadikan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dalam perspektif pembangunan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya yang sangat strategis yang bersifat nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan, keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak azasi manusia.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum diselesaikan. Salah satunya adalah jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Azasi Manusia tahun 1948 dan ditetapkan dalam Konvensi ILO nomor 102 tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Direktorat Jaminan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia mempunyai program jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan tidak mampu yang diselenggarakan melalui dua skema, yakni Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP). Dalam hal ini kita lebih fokus ke BKSP sebagai obyek penelitian. Sasaran BKSP adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) non potensial yang meliputi lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik dan mental terlantar, penyandang eks penyakit kronis dan penyandang psikotik.

Tujuan utama BKSP adalah memberikan bantuan dasar hidup minimal yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Sosial nomor 51/HUK/2003.

Penerapan BKSP mulai digulirkan pada tahun 2003, setelah terbentuknya kembali Departemen Sosial yang sempat dibubarkan oleh pemerintah pada era Abdurrahman Wahid. BKSP dirintis dan diujicoba di delapan provinsi termasuk provinsi Sulawesi Selatan.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 13 (g) Urusan Wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi yang meliputi :”Penanggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/Kota. Pada pasal 14 (g) urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi :”Penanggulangan masalah sosial”. Oleh karena itu, Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) merupakan usaha pelayanan sosial dalam bentuk pemberian perlindungan dan jaminan penghidupan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial non potensial yang dilakukan secara berkelanjutan. Program dan kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan amanat Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf H ayat (3) yang berbunyi :”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, dan

pasal 34 ayat 1 yang berbunyi :”Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, serta ayat 2 yang berbunyi :”Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dalam menjalankan roda pembangunan, Pemerintah Pusat kini hanya mempunyai kewenangan mengambil kebijakan, pemantauan dan evaluasi, sedangkan pemerintah daerah cq. Dinas kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat pelaksanaannya dilakukan berdasarkan inisiatif dan kemampuan daerah. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pengembangan sistem jaminan sosial BKSP maka perlu dipersiapkan secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sistem jaminan sosial.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kegiatan kajian program jaminan sosial merupakan sebuah upaya strategis yang dapat membantu memberikan masukan guna mengembangkan sistem jaminan sosial agar lebih sejalan dengan tuntutan dan kondisi masyarakat secara faktual.

Sejak diluncurkan pada tahun 2003, kegiatan BKSP dilaksanakan oleh organisasi sosial (Orsos) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bersama dengan Yayasan. Sampai tahun 2007 ini lokasi pelaksanaannya telah menjangkau keseluruhan Provinsi di Indonesia dan dilaksanakan oleh 214 organisasi sosial (Orsos/KUBE), sedangkan di Sulsel pada tahun 2003 ada

enam pengelola program kegiatan BKSP yaitu Yayasan Peduli Masyarakat Miskin (Kab.Gowa), Yayasan Karya Insani (Kab.Gowa), Yayasan Lembah Hijau (Kab.Maros), Yayasan Terang (Kab.Maros), Yayasan Taka Bonerate (Kota Makassar), Yayasan di Pasar Kalimbu (Kota Makassar), dan ditahun 2004 pengelola program BKSP ada 3 yayasan yaitu : Yayasan Al Ansar (Kab.Gowa), Yayasan Bumi Nusantara (Kota Makassar) dan Yayasan Kartika Sejahtera (Kota Makassar).

Mengacu pada upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien serta berkelanjutannya program, maka diperlukan penguasaan manajemen yang professional dalam penyelenggaraan kegiatan BKSP. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diketahui bahwa pengelolaan kegiatan BKSP selama ini masih sangat bervariasi, kinerjanya belum efektif dan efisien serta belum dilakukan secara professional sehingga tingkat keberhasilannya belum optimal.

Sebagai bagian dari sistem jaminan sosial, kegiatan BKSP pada masa mendatang diharapkan dapat lebih berkembang, berjalan seiring dengan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang lain. Untuk itu, kemandirian dan berlanjutnya penyelenggaraan BKSP sangat diperlukan. Demikian pula didalam UU No.6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial ada beberapa pasal yang mengatur tentang jaminan sosial antara lain :

- Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa usaha-usaha pemerintah dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui sistem jaminan sosial.
- Sedangkan penjelasan pasal 5 ayat (1) yang pada dasarnya menyatakan bahwa jaminan sosial merupakan sekuritas sosial pelaksanaannya mengutamakan asuransi sosial dan bantuan sosial.
- Pasal 8 menyatakan bahwa masyarakat di beri kesempatan yang seluas-luasnya dalam usaha kesejahteraan sosial.

Berdasarkan amanat Konstitusi dan UU tersebut yang pada dasarnya menyatakan bahwa usaha kesejahteraan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, dunia usaha/organisasi sosial dan masyarakat dalam menuju ke pemerintahan yang baik (good governance).

Sehubungan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu melalui BKSP yang merupakan satu instrumen pengentasan kemiskinan, pelaksanaannya harus melibatkan pemerintah dan masyarakat. Agar pelaksanaan program jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu melalui BKSP dapat berjalan dengan lancar dan sesuai tahapan, maka peneliti perlu mengangkat menjadi suatu penelitian yang berjudul Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen di Kota Makassar (Kasus Yayasan Taka Bonerate dan Yayasan Kartika Sejahtera)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi organisasi pengelola Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen.
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat yayasan pelayanan dan pengelolaan bantuan kesejahteraan sosial permanen.
3. Bagaimana hasil yang diharapkan bantuan kesejahteraan sosial permanen di Kota Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan fungsi organisasi pengelola bantuan kesejahteraan sosial permanen
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelayanan dan pengelolaan bantuan kesejahteraan sosial permanen.
3. Untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari bantuan kesejahteraan sosial permanen.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dapat di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, masukan dan informasi bagi perumusan kebijaksanaan dalam pengembangan sistem program Jaminan Sosial, pengembangan kapasitas kelembagaan dan pengembangan jaringan kerja.
2. Kegunaan akademik dari hasil ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi penelitian-penelitian ilmiah, selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan komparatif yang mengkaji tentang bantuan kesejahteraan sosial permanen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelayanan

Dalam memahami arti pelayanan tidak terlepas dari masalah kepentingan umum yang menjadi asal-usul timbulnya pelayanan. Kepentingan umum adalah berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada umum, meskipun pada perkembangan selanjutnya pelayanan jasa juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu bentuk dari proses penyelenggaraan suatu organisasi. Diimana setiap organisasi pemerintah, maupun organisasi swasta tujuan pelayanan telah ditetapkan bersamaan dengan pembentukan organisasi.

Untuk menjelaskan pelayanan yang lebih luas, penulis mengutip pendapat dari Sarlito Wirawan yang mengemukakan bahwa “ Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan sebagai proses pelayanan, berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.”

Berdasarkan pengertian tersebut, pelayanan dilaksanakan oleh sekelompok orang guna memenuhi kepentingan akan sesuatu dari sekelompok orang lainnya dalam suatu wadah atau organisasi, baik pemerintah maupun swasta lebih tegas mengenai pengertian pelayanan, H.A.S. Moenir mengemukakan pandangannya sebagai berikut : “ Pelayanan

adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak pelayanan ini sifatnya tidak selalu kolektif, sebab melayani kepentingan perorangan asal kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan bersama yang telah diatur, termasuk dalam pengertian pelayanan.”

Pelayanan adalah segenap proses pemenuhan kebutuhan yang langsung melalui aktivitas orang lain, proses dalam pengertian ini adalah terbatas pada kegiatan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

The Liang Gie, mengemukakan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi mengamalkan dan mengabdikan diri. Sedangkan menurut Moenir, pelayanan adalah serangkaian proses penggunaan akal pikiran, panca indera dan anggota badan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Dari kedua pengertian pelayanan tersebut dapat dilihat bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan mengurus dan mengamalkan serta mengabdikan diri kepada orang banyak yang menyatakan sebagai suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya S. Pamudji (1990:27)mengartikan pelayanan public sebagai segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Selanjutnya Moenir menyatakan bahwa

pelayanan public adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan orang banyak.

Berdasarkan pada pandangan berbagai ahli tersebut diatas, maka pelayanan publik yang dimaksudkan adalah sama dengan pelayanan masyarakat dan tidak selalu bahwa pelayanan itu bersifat kolektifitas karena melayani kepentingan perorangan asal kepentingan masih termasuk dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan bersama. Oleh karena pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dari organisasi atau badan yang berorientasi pada pengabdian masyarakat.

Sementara itu menurut Moenir (1995), ada beberapa faktor yang mendukung pelayanan masyarakat yaitu :

1. Faktor kesadaran, adalah suatu proses berfikir melalui metode renungan, pertimbangan sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa-jiwa sebagai pangkal tolak untuk perbuatan tindakan yang akan dilakukan kemudian. Selain itu ada kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan dan melaksanakan kehendak.
2. Faktor aturan adalah seperangkat aturan penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang, makin maju dan majemuk suatu masyarakat, makin besar pula peranan aturan dalam hidupnya atau dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak dan tenang tanpa adanya aturan.

3. Faktor organisasi dalam mengorganisir fungsi pelayanan dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam peningkatan mutu dan kelancaran pelayanan.
4. Faktor pendapatan, ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, natural maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu.
5. Faktor kemampuan keterampilan yang meliputi technical skill dan human skill.
6. Faktor sarana pelayanan, yaitu segala jenis peralatan perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pembantu dalam melaksanakan pekerjaan dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu.

Bentuk layanan umum yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta pada dasarnya tidak terlepas dari tiga bentuk, yaitu :

1. Layanan dengan lisan

Dilakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan masyarakat, bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Agar layanan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pelaku layanan, yaitu :

- a. Memahami benar-benar masalah-masalah yang ada di ruang lingkup tugasnya.
- b. Mampu memberikan penjelasan tentang apa yang diperlukan dengan lancar, singkat tapi jelas, sehingga mereka puas dengan pemberian keterangan tersebut.
- c. Bertingkah laku sopan dan ramah
- d. Bertugas dengan penuh disiplin dan tidak melalaikan tugas
- e. Tidak melayani orang-orang yang hanya ingin mengobrol.

2. Layanan melalui tulisan

Adalah bentuk pelayanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas layanan tulisan ini, terdiri dari dua golongan yaitu :

- a. Layanan berupa petunjuk , informasi dan yang sejenisnya ditujukan pada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka mendapatkan pelayanan dari instansi atau lembaga yang berbentuk tulisan atau gambar sketsa.
- b. Layanan berupa reaksi tertulis atau permohonan, laporan, keluhan, pemberian penghargaan dan pemberitahuan informasi lainnya.

3. Layanan berbentuk perbuatan

Antara layanan lisan maupun tulisan sering digabungkan. Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum, kecuali yang khusus dilakukan dengan melalui hubungan tulis, karena faktor jarak, hanya dititik beratkan pada perbuatan itu

sendiri yang ditunggu oleh yang berkepentingan. Jadi tujuan utama yang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan.

B. Kriteria Peningkatan Pelayanan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai abdi negara yang mempunyai kewajiban untuk melayani kepentingan masyarakat agar masyarakat memperoleh kepuasan atas pelayanannya, maka untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu mengacu pada keputusan Menpan No.8/1993 tanggal 13 Maret 1993 tentang kebijaksanaan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan berpedoman pada beberapa kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Kriteria Sederhana

Di dalam keputusan Menpan tersebut menyebutkan bahwa kesederhanaan merupakan salah satu ukuran dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dimana dikatakan bahwa “kesederhanaan merupakan prosedur / tata cara pelayanan yang diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

2. Kejelasan dan Kepastian

Kejelasan dan kepastian yaitu menyangkut prosedur / tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan

bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan, kemudian rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya begitupula jadwal penyelesaian pelayanan.

3. Keamanan

Keamanan merupakan proses serta hasil pelayanan yang dapat memberikan kenyamanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Keterbukaan

Keterbukaan adalah suatu indikator yang menjamin kepuasan bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan karena itu keterbukaan merupakan salah satu prosedur atau tata cara dan persyaratan satuan kerja / pejabat penanggungjawab memberi pelayanan, waktu penyelesaian , rincian biaya / tarif serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui oleh masyarakat, baik diminta ataupun tidak diminta.

5. Efisiensi

Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain terkait.

6. Keadilan yang merata

Disini cakupan / jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

7. Ketetapan waktu

Ketetapan waktu yaitu bahwa pelaksanaan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan layanan masyarakat yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah agar kebutuhan pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka ada beberapa faktor pendukung dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

a. Faktor kesadaran aparat

Kesadaran menunjukkan ketenangan dan keseimbangan jiwa seseorang. Dengan ketenangan dan keseimbangan ini orang akan dapat berfikir dengan bersih dan jernih. Adanya kesadaran inilah yang akan menuntun seseorang pada keihlasan dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu tugas yang dalam hal ini adalah tugas pelayanan.

Kita ketahui bersama bahwa tugas yang dilaksanakan akan dengan penuh keihlasan dan kesungguhan akan meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan tugasnya, yang mana hal ini sangat diharapkan dari pengguna jasa layanan.

Dampak kesadaran ini akan sangat luas. Ia akan menjiwai tingkah laku dan perbuatan selanjutnya, sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan faktor kesadaran ini merupakan faktor penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Faktor aturan

Aturan merupakan suatu perangkat lunak dalam organisasi yang menjadi landasan kerja sekaligus membatasi gerak seseorang. Kualitas suatu layanan juga akan sangat dipengaruhi oleh kualitas aturan yang dimiliki. Makin baik aturan makin baik pula mekanisme kerja dan pada akhirnya output berupa layanan akan sangat memuaskan pengguna.

Sebaliknya, buruknya aturan yang ada akan membuat mekanisme kerja yang semrawut tanpa ada kepastian. Implikasinya sudah pasti akan sangat jauh yang diharapkan. Oleh karena itu para pembuat kebijakan hendaknya benar-benar mempertimbangkan dan mengakomodasikan dinamika organisasi dan masyarakat. Di lain pihak tegaknya suatu aturan juga akan ditentukan oleh tingkat kedisiplinan aparat untuk mematuhi aturan dimaksud.

c. Faktor Organisasi

Terkait dengan karakteristik masyarakat yang memiliki watak kehendak yang multi kompleks, maka organisasi dalam hal ini tidaklah semata-mata dalam bentuk kelembagaan suatu kerja, tetapi lebih dari itu harus ditekankan juga penciptaan mekanisme kerja yang mampu

memberikan efisiensi dan efektifitas layanan. Mekanisme ini menyangkut sistem, prosedur dan metode kerja yang berfungsi sebagai tata laksana sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan rapi dan apik.

d. Faktor pendapatan

Salah satu motivasi bagi setiap orang yang bekerja dalam suatu organisasi adalah ingin memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarga secara layak. Secara umum diketahui bahwa kebutuhan hidup manusia selalu berubah-ubah dan bertingkat atau bervariasi dan berkembang sesuai dengan kemajuan peradaban manusia seperti dikatakan oleh Maslow yang dikutip oleh Drs.Lailil Kadar (1994) yang menyatakan bahwa : manusia selalu merasa kurang. Ia punya banyak keinginan dan selalu ingin lebih. Suatu kepuasan tidak menjadi motivasi bagi perilaku seseorang. Atas dasar asumsi inilah, kemudian Maslow menyusun manusia secara berjenjang mulai dari kebutuhan yang paling rendah sampai kepada kebutuhan tertinggi (*self actualization*). Teori ini kemudian dikenal dengan nama teori kebutuhan Maslow.

e. Faktor kemampuan dan Keterampilan

Kemampuan dan keterampilan merupakan dua kata baku yang dipergunakan untuk menunjukkan kapasitas seseorang dalam melaksanakan tugas dengan baik. Dalam bahasa Inggris kemampuan diterjemahkan dengan ability yang bukan merupakan istilah baku dalam bidang kepegawaian di Indonesia. Istilah baku yang digunakan adalah skill. Untuk

memudahkan pengertian, maka kemampuan / keterampilan yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang dinamakan skill dalam bahasa Inggris. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Menurut Robert R Kratz sebagaimana dikutip oleh Moenier ada tiga yaitu technical skill, human skill dan conceptual skill. Sedangkan keterampilan merupakan kemampuan melaksanakan tugas / pekerjaan dengan menggunakan anggota badan seperti alat, saraf, perasaan dan pikiran, serta peralatan kerja yang ada. Semakin tinggi skill yang dimiliki semakin berkualitas hasil pekerjaan dan demikian pula juga sebaliknya.

f. Faktor Sarana Pelayanan

Lima faktor yang disebutkan tadi belum mampu menghasilkan kualitas layanan yang sempurna, bila tidak didukung oleh adanya sarana pelayanan yang memadai sebagai alat utama dalam melaksanakan pekerjaan, sekaligus berfungsi sosial bagi orang-orang yang berhubungan dengan organisasi dimaksud. Sarana pelayanan ini terdiri dari sarana kerja yaitu sarana benda yang berfungsi secara langsung maupun tidak langsung (alat bantu) dan proses produksi barang dan jasa. Kelengkapan sarana ini akan sangat mendukung dalam kecepatan dan ketepatan pelayanan yang diberikan. Demikian pula sebaliknya sulit untuk mengharapkan layanan yang baik dengan sarana yang pas-pasan, oleh karena itu suatu instansi yang bergerak dalam bidang layanan masyarakat khususnya pemerintahan harus

berusaha melengkapi sarana layanan yang vital sesuai dengan kemampuan yang ada.

C. Konsep Partisipasi

Tujuan pembangunan dapat tercapai melalui perumusan dan pelaksanaan program pembangunan yang konsisten berdasarkan sistem prioritas yang muncul dari bawah/masyarakat. Peran aktif atau partisipasi masyarakat sangat penting artinya dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Karena tanpa partisipasi masyarakat kelancaran pembangunan akan sulit terealisasi dengan baik. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan adalah merupakan cara yang sangat tepat karena dengan cara itu masyarakat merasa terlibat sekaligus bertanggungjawab dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Partisipasi dapat dinyatakan sebagai suatu yang mendekati keterlibatan yang bersangkutan secara total dalam suatu kegiatan menurut kemampuan, pemikiran, gagasan, konsepsi atau kontribusi masing-masing sesuai dengan fungsi/posisi/tugas dan peranannya.

Partisipasi akan selalu berkenalan dengan kondisi dan sikap mental, baik perseorangan, kelompok maupun masyarakat luas yang kita kenal dengan sebutan publik.

Dari pengertian tersebut diatas, maka partisipasi akan terbangun jika didukung oleh kemampuan, perhatian atau minat, motivasi, fasilitas yang dimiliki, kesempatan dan lingkungan yang menunjangnya. Dengan perkataan

lain partisipasi ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Sastropetro (1988 ;40) yang mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Abdullah (1987;76) mengemukakan konsep partisipasi adalah sikap tanggap masyarakat lokal terhadap anjuran-anjuran, petunjuk tentang cara pemakaian teknologi dan kesediaan memberikan pengorbanan dalam arti investasi modal, waktu, tenaga dan uang untuk mencapai tujuan pembangunan.

Berdasarkan konsep partisipasi yang dikemukakan oleh kedua ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi mengandung makna pokok yaitu ;

1. Keterlibatan dalam bentuk sikap (attitude), dimana masyarakat mempunyai kesadaran untuk ikut serta dalam setiap proses pembangunan.
2. Keterlibatan dalam bentuk tindakan (action), dimana masyarakat terlibat langsung dalam setiap kegiatan pembangunan.

Selanjutnya Mubyarto dalam Ndraha (1990;102) mengemukakan konsep partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti

mengorbankan kepentingan diri sendiri, sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1974;207) membagi tiga pengertian partisipasi yaitu :

1. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat dari pembangunan secara berkeadilan.

Sedangkan Koentjaraningrat (1984;6) mengatakan bahwa partisipasi dalam pembangunan lebih menekankan pada kemampuan diri sendiri, sadar untuk melaksanakan aktifitas pembangunan, disini semua potensi manusia diarahkan bagi pelaksanaan pembangunan melalui swadaya gotong royong maupun secara sukarela. Pada dasarnya partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah tetapi juga masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya.

Dalam pengertian partisipasi dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara sukarela serta ikut menikmati hasil pembangunan tersebut.

Selanjutnya Tjokroamidjojo (1974) mengemukakan empat aspek dalam partisipasi yaitu ;

1. Ikut sertanya masyarakat sesuai dengan mekanisme proses pembangunan dan turut menentukan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.
2. Meningkatkan kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan dengan sebaiknya.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan kebijaksanaan yang telah ditentukan dalam proses pembangunan.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam pembangunan yang berencana.

Keempat aspek diatas menekankan pentingnya partisipasi dilakukan melalui mekanisme proses pembangunan yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah direncanakan.

Dari berbagai penjelasan dan rumusan tentang partisipasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan, pemerintah dan pemberdayaan masyarakat akan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.

Partisipasi selalu dikaitkan dengan masyarakat (publik), adapun konsep masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Agust Comte dalam Soekanto (1977;35) adalah masyarakat merupakan kelompok-kelompok

mahluk hidup dengan realitas-realitas baru berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri, manusia diikat dalam kehidupan kelompok sosial. Individu sendiri adalah mahluk lemah yang sukar untuk dapat hidup sendiri. Apabila ia hidup bersama dengan orang lain, teman bergaul maka selanjutnya dapat menimbulkan dinamika sosial yang memungkinkan untuk dapat menguasai keadaan disekitarnya.

D. Dimensi Dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi asas sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk

membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah.

Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan

menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Indikator Pemberdayaan

Agar para pendamping mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika pendampingan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan (Girvan, 2004):

- Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

- Kemampuan membeli komoditas 'kecil': kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- Kemampuan membeli komoditas 'besar': kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
- Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.

- Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Keberhasilan pemberdayaan keluarga miskin dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis .

Dalam kaitannya dengan masyarakat miskin, aspek pemberdayaan di atas dapat dilakukan melalui lima strategi pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 1997:218-219):

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembali segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
3. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Tabel Indikator Pemberdayaan

JENIS HUBUNGAN KEKUASAAN	KEMAMPUAN EKONOMI	KEMAMPUAN MENGAKSES MANFAAT KESEJAHTERAAN	KEMAMPUAN KULTURAL DAN POLITIS
Kekuasaan didalam : Meningkatnya kesadaran dan keinginan untuk berubah	<ul style="list-style-type: none"> - evaluasi positif terhadap ekonomi dirinya - keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara - keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumahtangga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - kepercayaan diri dan kebahagiaan - keinginan memiliki kesejahteraan yang sejahtera - keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain - keinginan untuk mengontrol jumlah anak 	<ul style="list-style-type: none"> - assertiveness dan otonomi - keinginan untuk menghadapi subordinasi jender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik. - Keinginan terlibat dalam proses - proses budaya hukum dan politik - \
Kekuasaan untuk; <ul style="list-style-type: none"> - meningkatnya kemampuan individu untuk berubah - meningkatnya kesempatan untuk memperoleh akses 	<ul style="list-style-type: none"> - akses terhadap pelayanan keuangan mikro - akses terhadap pendapatan - akses terhadap asset-aset produktif dan kepemilikan rumahtangga - akses terhadap pasar - penurunan beban dalam pekerjaan domestik termasuk 	<ul style="list-style-type: none"> - keterampilan termasuk kemelekan huruf - status kesehatan dan gizi - kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi - ketersediaan layanan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - mobilitas dan akses terhadap dunia diluar rumah - pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan - kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hokum, politik dan kebudayaan

	perawatan anak.		
<p>Kekuasaan atas ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro - kekuasaan atau tindakan individu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya - kontrol atas pendapatan aktifitas keluarga yang lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana. - Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat - keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya hukum dan politik
<p>Kekuasaan dengan ;</p> <p>Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga masyarakat dan makro</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern - mampu memberi gaji terhadap orang lain - tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah) pasar dan diskriminasi jender pada konteks ekonomi makro 	<ul style="list-style-type: none"> - penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga - tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis. - Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat - Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi jender yang bersifat cultural, politis hukum pada tingkat masyarakat makro.

E. Ruang Lingkup Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu instrumen masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi resiko-resiko sosial., maka dalam ruang lingkupnya yang paling luas sekalipun, jaminan sosial hanya dapat mencakup risiko ekonomis dan risiko sosial secara kolektif. Dalam menghadapi risiko

ekonomis inipun, jaminan sosial hanya menangani masalah terbatas, sehingga tidak akan mampu melayani persoalan secara makro, misalnya menanggulangi risiko kelesuan ekspor akibat depresi dunia. Demikian juga dengan risiko sosial yang ditanggulangi akan terbatas juga, dan tidak menangani misalnya masalah rasial, atau secara perorangan.

Dalam ruang lingkup yang luas, John G. Turnbull dan kawan-kawan, mengartikan jaminan sosial sebagai suatu keadaan yang terlindung atau aman dari berbagai jenis ancaman dan bahaya. Tetapi mereka kemudian juga membatasi jaminan tersebut pada bidang ekonomis saja. Drs. Harun Alrasyid, Dirjend bantuan sosial, Departemen Sosial di Jakarta tahun 1978 mengemukakan bahwa jaminan sosial merupakan suatu perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat.

Meskipun sudah diberikan batasan yang hanya menyangkut risiko ekonomis dan sosial, namun pengertian jaminan sosial itupun masih cukup luas. Guna mempermudah analisa jaminan sosial dalam arti yang luas ini kiranya dapat di golongankan dalam empat kegiatan usaha utama yaitu :

- a. Usaha-usaha di bidang pencegahan dan pengembangan, yaitu kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan, bantuan hukum, keagamaan dan organisasi masyarakat dikelompokkan dalam pelayanan sosial.

- b. Usaha-usaha di bidang pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, anak yatim-piatu, penderita cacat, dan berbagai ketunaan yang dapat disebut bantuan sosial.
- c. Usaha-usaha dibidang pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, lingkungan, air bersih, transmigrasi, perkoperasian, ketertiban dan masyarakat suku terasing dapat dikategorikan sebagai sarana sosial.
- d. Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi sosial.

Segala bentuk kemanfaatan yang diberikan melalui program jaminan sosial ini hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat dasar dan minimal untuk menjaga harkat dan martabatnya. Pemenuhan kebutuhan itu menjadi tanggungjawab pemerintah atau swadaya masyarakat, karena yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukannya sendiri secara individual. Dan jelas bahwa penanganannya harus dilakukan secara lintas sektoral oleh berbagai departemen serta berbagai bidang kemasyarakatan .

Guna mengetahui dan mengukur hasil serta kemajuan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ini biasanya dipergunakan indikator di bidang-bidang : kependudukan, transmigrasi, keluarga berencana,

kesehatan, gizi, ketenagakerjaan, pendidikan dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, perumahan, agama, serta bidang umum lainnya.

Apabila kebutuhan jaminan sosial tersebut secara minimal telah dapat dipenuhi dengan wajar dan indikator sosial telah berkembang secara positif, maka masyarakat akan dapat memikirkan kebutuhan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Keadaan tersebut menggambarkan terciptanya kesejahteraan sosial yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial sebaik-baiknya bagi diri, keluarganya serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia.

F. Pengertian Jaminan Sosial

Dengan demikian, dalam ruang lingkup yang luas, jaminan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran serta kemiskinan pada umumnya. Namun biasanya pengertian jaminan sosial hanya meliputi bantuan sosial serta asuransi sosial sebagaimana yang didefinisikan oleh ILO (International Labour Organisation). Dalam salah satu konvensinya mengenai standar jaminan sosial sebagaimana tertuang dalam *social security convention*. ILO mengartikan jaminan sosial sebagai usaha pemerintah untuk melindungi masyarakat (atau sebagian besar anggota masyarakat) dari tekanan ekonomi

yang bisa menyebabkan hilangnya penghasilan karena sakit, pengangguran, cacad, hari tua dan kematian; untuk menyediakan bagi masyarakat itu pemeliharaan kesehatan yang dibutuhkan dan untuk memberi bantuan kepada keluarga dalam memelihara anak.

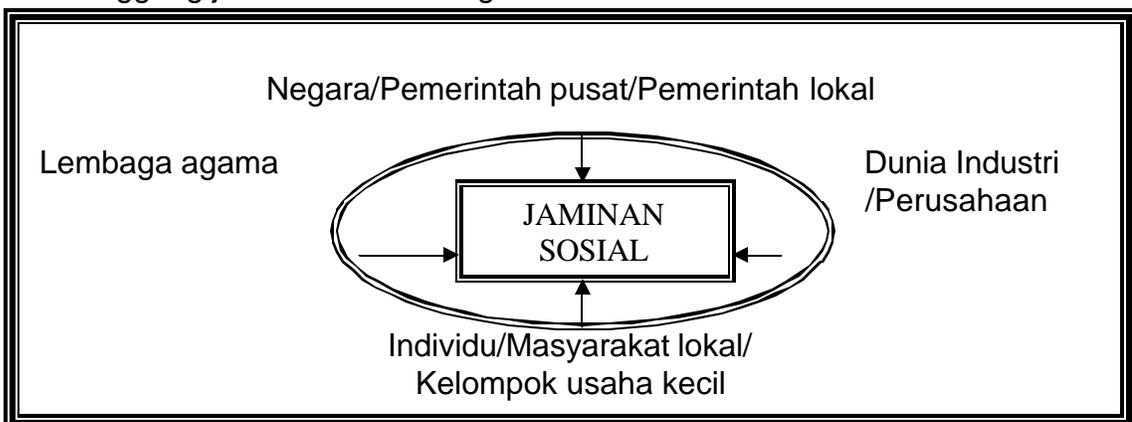
Dalam pengertian Undang-undang no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional memberikan pengertian jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Sedangkan dalam pengertiannya yang murni, jaminan sosial diartikan sebagai asuransi sosial, dalam pengertian yang murni tersebut, jaminan sosial diartikan sebagai perlindungan terhadap hilangnya penghasilan, seperti dalam pemberhentian tenaga kerja, dan/atau terhadap tambahan biaya hidup seperti dalam perawatan waktu sakit.

Defenisi jaminan sosial dalam pengertian yang terakhir itu dapat dijumpai dalam kuliah Kenneth Thomson..seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal International Social Security Association (ISSA) di Jenewa, dalam regional training seminar ISSA di Jakarta Juni 1980. Ia mengatakan bahwa jaminan sosial dapat didefenisikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk

menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekwensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak. Adapun peristiwa-peristiwa yang biasanya dijamin oleh jaminan sosial meliputi :

- a. Kebutuhan akan pelayanan medis
- b. Tertundanya, hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan yang disebabkan :
 - 1) Sakit
 - 2) Hamil
 - 3) Kecelakaan kerja
 - 4) Hari tua
 - 5) Cacad
- c. Tanggung jawab untuk keluarga dan anak-anak.



Gambar Model Jaminan Sosial

G. Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen

Sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV pada dasarnya menyatakan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan sosial bagi warga negara termasuk PMKS Non Potensial. Penjelasan lebih lanjut dari amanat UUD 1945 tersebut diterangkan dalam ketentuan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Warga negara berhak mendapat pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, serta ketentuan pasal 34 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Pelaksanaan perlindungan sosial yang pada hakekatnya merupakan jaminan sosial, juga pada dasarnya sangat penting bagi negara-negara di dunia sehingga dituangkan di dalam Deklarasi PBB tentang Human Right (Hak Asasi Manusia) yang menyatakan bahwa “jaminan sosial merupakan elemen dasar Hak Asasi Manusia yang berlaku bagi seluruh warga negara dan diarahkan untuk memberikan perlindungan guna mempertahankan taraf kesejahteraan sosial yang layak bagi kemanusiaan.”

Berkaitan dengan hal tersebut dan pentingnya penegasan terhadap pengakuan jaminan sosial bagi setiap warga negara Indonesia, maka dimasukkan di dalam batang tubuh UUD 1945 melalui amandemen pasal 28 H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2). Kedua pasal tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa negara Indonesia mengembangkan sistem jaminan sosial, dan berkewajiban memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warga

negara Indonesia termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) non potensial, seperti : lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik dan mental terlantar, penyandang psikotik terlantar dan penyandang eks penyakit kronis terlantar.

PMKS non potensial tersebut penanganannya telah diupayakan pemerintah bersama masyarakat baik melalui sistem Panti maupun Luar Panti, akan tetapi upaya tersebut masih belum memadai. Hal itu antara lain disebabkan oleh : 1) Besar dan kompleksnya masalah, 2) Masih terbatasnya model pendekatan penanganan masalah, dan 3) Terbatasnya daya jangkau pelayanan. Disisi lain, potensi masyarakat yang sangat besar itu belum didayagunakan secara optimal . oleh karena itu Pemerintah Cq. Departemen Sosial RI mengembangkan suatu pendekatan penanganan PMKS non potensial berbasis masyarakat dengan Jaminan Kesejahteraan Sosial Gotong Royong (JKS-GR).

Sejak Departemen Sosial berdiri kembali tahun 2001, kegiatan JKS-GR dikaji melalui Seminar dan telaahan oleh kelompok kerja sistem Jaminan Sosial (Pokja SJS). Hasil kajian menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut perlu dilanjutkan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan merekomendasikan untuk dilakukannya penyempurnaan program JKS-GR. Menindaklanjuti rekomendasi diatas, terbit SK Menteri Sosial RI No. 51/Huk/2002 tentang pelaksanaan program Jaminan sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Asuransi kesejahteraan sosial

(Askesos) dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP). Sejak saat itulah istilah JKS-GR diganti menjadi BKSP dengan sasaran Lanjut Usia Terlantar, Cacat mental dan Fisik terlantar, Penyandang psikotik terlantar dan penyandang aks penyakit kronik terlantar. Keempat sasaran ini selanjutnya disebut PMKS non potensial.

BKSP yang merupakan penyempurnaan JKS-GR bertujuan :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) PMKS non potensial sehingga terpelihara taraf kesejahteraan sosialnya.
2. Terlembagakannya kegiatan penyantunan berbasis masyarakat.
3. Meningkatnya kepedulian sosial/kesetiakawanan sosial dari masyarakat, khususnya dalam penanganan PMKS non potensial.

H. Manajemen Pengelolaan BKSP

Menyeruaknya kelompok masyarakat rentan yang termarginalisasi akibat kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada mereka, menjadi lahan subur tumbuhnya LSM dengan berbagai corak dan agenda mereka. Eldrege (1988) memilah-milah LSM dalam beberapa kategori yang bersifat ideologis : kesejahteraan, developmentalisme, advokasi, transformasi, dll. Dominasi negara orde baru yang begitu kuat menyebabkan sebagian LSM menganggap penting untuk mengambil jarak dan menolak berkolaborasi dengan agenda pemerintah / negara. Keberadaan LSM dianggap sebagai *counter hegemoni* terhadap posisi negara yang begitu kuat dan merasuki

setiap lini kehidupan masyarakat (Mansour Fakhri, 1996). Oleh karena itu sebagian LSM lebih senang menggunakan terminologi ORNOP (Organisasi Non Pemerintah), bukan sekedar terjemahan dari NGO, tetapi yang lebih penting untuk menjelaskan posisi yang berbeda dengan negara (pemerintah).

Sementara untuk sebagian LSM lain, persoalan ketidakadilan struktural tidak cukup hanya dengan melakukan tekanan-tekanan terhadap kekuasaan atau dengan menganggap negara sebagai musuh karena menjadi alat yang eksploitatif. Permasalahan struktural harus dijawab dengan pengorganisasian rakyat secara nyata, mendidik mereka dan memperkuat modal sosial mereka melalui kegiatan usaha bersama agar unit-unit ekonomi rakyat dapat tumbuh. Oleh karena itu membangun keswadayaan dan mata pencaharian rakyat yang berkelanjutan menjadi fokus yang penting.

Era reformasi dan demokratisasi, posisi LSM semakin penting untuk membangun kembali modal sosial masyarakat yang hancur akibat krisis multidimensi. Di sisi lain menciutnya peran pemerintah di sektor pelayanan publik berdampak pada turunnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu isu sektor publik (kesehatan, pendidikan, dll) kian marak menjadi program LSM. Diperkirakan ada lebih dari 13.500 LSM (Depdagri, 2002).

Maraknya peluang-peluang proyek yang dapat diperoleh LSM menjadi sebuah tantangan baru bagaimana LSM untuk menjaga karakter independensinya dan tidak terjebak dalam kepentingan untuk sekedar

mendapatkan dana agar bisa survive. Oleh karena itu pertanyaan reflektif yang layak kita lontarkan ialah, seberapa besar kontribusi ribuan proyek yang telah dilakukan LSM bagi perubahan sosial di Indonesia.

Secara garis besar, diharapkan LSM/pendamping mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: apa itu pendampingan sosial, apa tujuannya, apa itu pemberdayaan masyarakat, apa tujuannya, apa ciri-ciri keluarga yang telah berdaya, mengapa keluarga miskin perlu didampingi, apa kaitannya dengan pemberdayaan.

1. Pengelolaan Usaha

Pengelolaan usaha BKSP merupakan kegiatan ekonomi dalam upaya menghasilkan pendapatan untuk mendukung pelaksanaan pemberian santunan. Pengelolaan usaha ini antara lain dapat dikelola melalui dua pola yaitu : 1) Pengelolaan usaha oleh lembaga pelaksana BKSP itu sendiri, 2) pengelolaan usaha oleh pihak lain seperti home industri dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui kemitraan usaha.

a. Prinsip-prinsip pengelolaan

Tim pengelola pada dasarnya adalah suatu unit organisasi yang secara terpisah dari lembaga pelaksana, yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP). Salah satu tugas tim pengelola adalah melaksanakan pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif. Agar pelaksanaan pengelolaan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana, maka

harus mengikuti prinsip-prinsip Pengelolaan Usaha. Adapun Prinsip-prinsip pengelolaan dimaksud adalah :

1) Pertanggungjawaban

Pengelolaan kegiatan BKSP dalam hal ini merupakan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan fungsional. Secara administratif di antaranya pengelola BKSP berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada lembaga, Instansi Sosial Provinsi dan Kab/Kota.

2) Transparansi

Kegiatan usaha BKSP diketahui oleh berbagai pihak dan hasil pelaksanaan kegiatan ini dapat diaudit oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Keterbukaan (Openess)

Pengelolaan usaha BKSP terbuka bagi berbagai masukan untuk peningkatan kinerja dan juga dapat memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

4) Legalitas

Kegiatan usaha BKSP ini harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5) Keberlanjutan

Kegiatan usaha BKSP harus diwujudkan dalam kegiatan ekonomis dengan mempertimbangkan peluang dan prospek pemasaran yang dapat menjamin keberlanjutan usaha.

Langkah-langkah Pengelolaan

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menentukan usaha apa yang dijalankan. Untuk itu agar usaha yang dijalankan sesuai dengan harapan maka harus membuat rencana kerja dengan terlebih dahulu menentukan tujuan, kegiatan yang dilakukan, waktu pelaksanaan dari hasil yang diharapkan : 1) Melakukan identifikasi usaha dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang usaha yang akan dijalankan.. 2) Menentukan siapa yang akan menjalankan usaha. 3) Analisa kelayakan usaha meliputi aspek produksi, pemasaran, lingkungan, keuangan/modal, dan keberlanjutan.

b. Pelaksanaan

Setelah rencana disusun, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan kegiatan usaha dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

1). Jaringan kerja

Lembaga pelaksana BKSP dalam rangka pengembangan UEP sebagai modal dasar penyantunan dalam pelaksanaan penyantunan

dapat berkesinambungan dan berkelanjutan, maka perlu adanya pendampingan dan kemitraan.

2). Mekanisme Pengelolaan

Lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana BKSP dan mendapat bantuan stimulan dari pemerintah Cq. Depatemen Sosial, membentuk tim pengelola BKSP dan mengembangkan UEP sesuai dengan proposal yang telah diajukan. 60% dari hasil keuntungan yang diperoleh diserahkan kepada urusan keuangan yang selanjutnya diberikan kepada seksi penyantunan untuk disalurkan kepada sasaran penyantunan, 20% untuk menambah modal usaha dan 20% untuk penggajian/honorarium pengelola

3). Administrasi

Lembaga pelaksana BKSP dalam rangka melaksanakan kegiatan harus mempunyai administrasi yang rapi dan pembukuan yang baik. Pembukuan dimaksud untuk mengetahui tentang kegiatan yang dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan, misalnya pembukuan : tentang keuntungan hasil usaha dan tentang pembayaran santunan kepada sasaran BKSP.

c. Pelaporan.

Kegiatan usaha yang dilaksanakan harus dilaporkan secara berjenjang kepada ketua tim pengelola , lembaga pelaksana, instansi sosial dan pihak lain yang berkepentingan.

Pelaporan merupakan kegiatan pertanggungjawaban suatu hasil pelaksanaan kegiatan. Laporan yang dimaksudkan disini adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban, baik secara lisan maupun tertulis, baik dari pengurus KUBE, maupun dari pendamping sosial KUBE, pengelola lembaga keuangan mikro, kepada pihak lain yang terkait dan yang peduli terhadap kegiatan pengembangan KUBE. Kegiatan pelaporan ini juga mempunyai berbagai tujuan antara lain :

- sebagai sarana komunikasi dari pihak yang melaporkan kepada pihak yang dilapori agar mendapatkan respon dan umpanbalik.
- Alat untuk menjamin kerjasama, saling pengertian, tali silaturahmi
- Alat untuk mengadakan perumusan perencanaan, pengendalian, penilaian, pengambilan keputusan atau kebijakan.
- Sarana dalam rangka memperluas wacana, ide serta tukar menukar pengalaman.

Syarat-syarat pelaporan hendaknya :

- Jelas: disusun dengan menggunakan bahasa, kata-kata, istilah yang sederhana , jelas, lazim digunakan oleh umum, mudah dipahami.
- Langsung mengenai sasaran permasalahan; hindarkan kata-kata yang muluk-muluk dan tidak kongkret, tidak mengulang-ulang atau bertele-tele, diusahakan singkat, padat, langsung pada pokok, permasalahannya.

- Lengkap: mencakup semua permasalahan yang dihadapi, yang penting, sangat perlu sesuai dengan prioritas urutannya.
- Konsisten: bersifat tetap, tangguh sesuai dengan akurasi datanya, tidak ada keterangan yang bertentangan satu sama lain.
- Objektif; menurut kenyataan dan kondisi serta situasi yang ada, tidak memihak.
- Cermat: teliti dan sudah dikoreksi
- Tepat saluran: tidak salah alamat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan
- Ada proses timbal-balik: yang dilaporinya timbul motivasi dan gairah untuk merespon, memberikan umpan balik.
- Tepat waktu, tidak terlambat agar tidak terjadi pemborosan waktu (wasting).

I. Kerangka Pikir Penelitian

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi hak dasar warga Negara, memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat sesuai dengan martabat kemanusiaan serta bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak.

Sejak diluncurkan pada tahun 2003, kegiatan BKSP dilaksanakan oleh organisasi sosial (Orsos) dan kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sampai

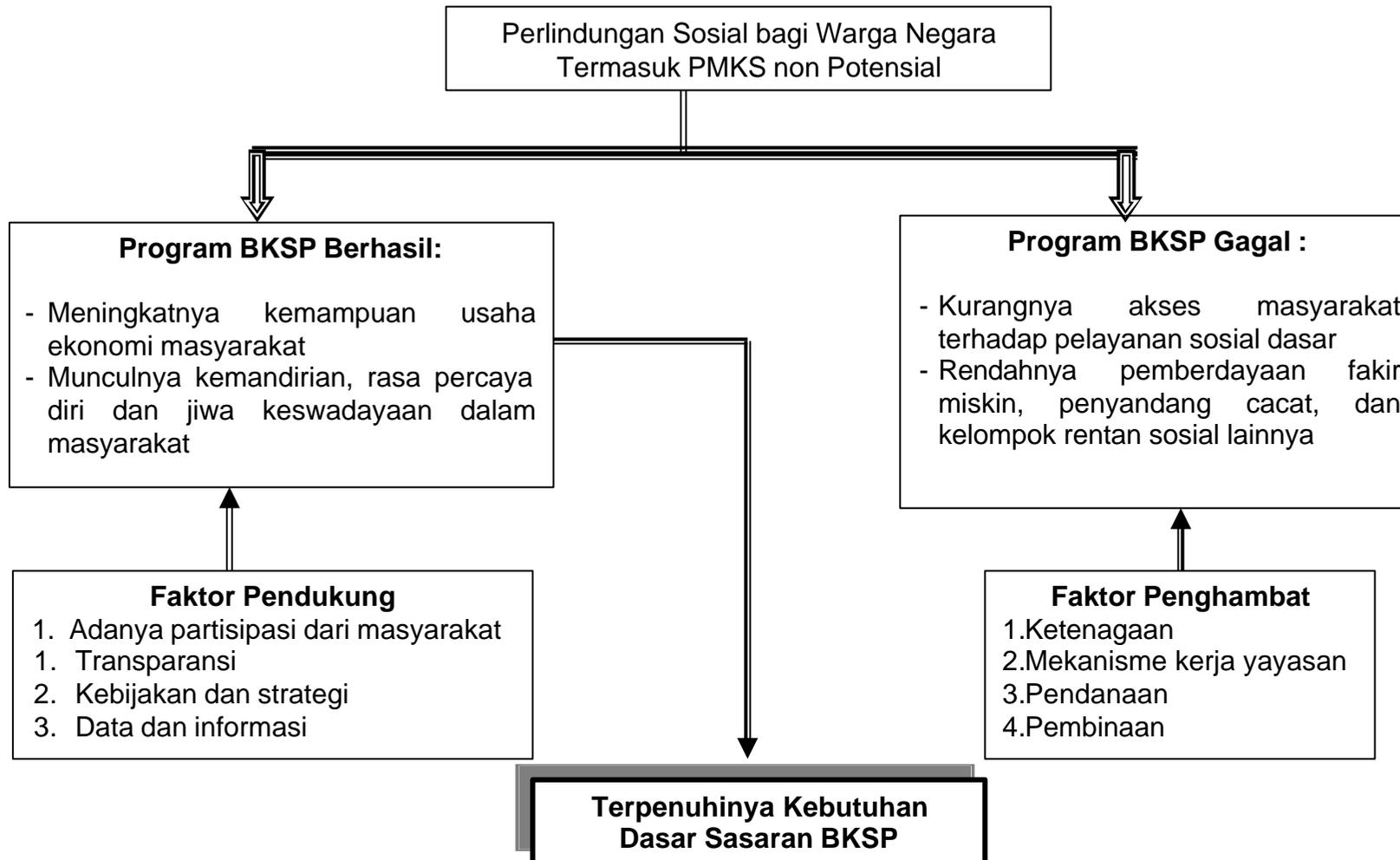
tahun 2007 ini lokasi pelaksanaannya telah menjangkau keseluruhan Provinsi di Indonesia dan dilaksanakan oleh 214 organisasi sosial (Orsos/KUBE).

Sasaran BKSP adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS) non potensial yang meliputi lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik dan mental terlantar, penyandang eks penyakit kronis dan penyandang psikotik. Tujuan utama BKSP adalah memberikan bantuan dasar hidup minimal yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Sosial nomor 51/HUK/2003.

Oleh karena itu, Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) merupakan usaha pelayanan sosial dalam bentuk pemberian perlindungan dan jaminan penghidupan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial non potensial yang dilakukan secara berkelanjutan. Program dan kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan amanat Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf H ayat (3) yang berbunyi :”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, dan pasal 34 ayat 1 yang berbunyi :”Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, serta ayat 2 yang berbunyi :”Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan amanat Konstitusi dan UU tersebut yang pada dasarnya menyatakan bahwa usaha kesejahteraan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, dunia usaha/organisasi sosial dan masyarakat dalam menuju ke pemerintahan yang baik (good governance).

Sehubungan hal tersebut, maka pelaksanaan jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu melalui BKSP yang merupakan satu instrument pengentasan kemiskinan, pelaksanaannya harus melibatkan pemerintah dan masyarakat. Agar pelaksanaan program jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu melalui BKSP dapat berjalan dengan lancar dan sesuai tahapan-tahapan yang telah di tentukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena atau hubungan antar-fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat. (Nazir M, 1999).

Dasar penelitian adalah studi kasus di mana bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah individu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan dengan jelas mengenai pelayanan bantuan kesejahteraan sosial permanen.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, dimulai dari bulan September sampai dengan Oktober 2007 di Yayasan Taka Banorate jl. Veteran selatan Ir. Mandala 8 no.4 dan yayasan Kartika Sejahtera jl. H. Mustafa Ir.3 no.7 selaku pengelola BKSP.

C. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni dipilih orang-orang di setiap instansi dan organisasi sosial tersebut yang berkaitan, menangani atau mengetahui masalah dalam penelitian ini, sehingga informan yang ditentukan menjadi informan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Sub Dinas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Propinsi Sulsel : 1 Orang

2. Kepala Sub Dinas Bantuan Sosial Kota Makassar dan jajarannya : 3
Orang

3. Yayasan Taka Bonerate
Ketua, Sekretaris dan Bendahara : 3
Orang

4. Yayasan Kartika Sejahtera
Ketua, Sekretaris dan Bendahara : 3
Orang

Sedangkan untuk penentuan informan bagi penerima layanan dan penerima santunan ini juga menggunakan teknik purposive sampling yaitu klien yayasan Kartika Sejahtera sebanyak 5 orang dan anggota Yayasan Taka Bonerate sebanyak 10 orang.

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan observasi dan wawancara mendalam. Observasi penelitian dilakukan dengan cara mengamati secara langsung penerima layanan dan penerima santunan bantuan kesejahteraan sosial permanen di Kota Makassar. Sementara wawancara mendalam dilakukan dengan jalan melakukan tanya-jawab secara mendalam dengan para informan. Wawancara ini dilakukan dengan tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah lebih dulu disusun pertanyaannya untuk mendapatkan data pendukung tentang manajemen pengelolaan bantuan kesejahteraan sosial permanen di Kota Makassar.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan erat dengan masalah penelitian yang dimaksud.

E. Teknik Analisis Data

Secara umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang telah diperoleh di lapangan, diolah kemudian disajikan dalam bentuk narasi

Muhadjir Noeng (1996) mengemukakan bahwa ; metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.

F. Konsep Operasional

1. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial.
2. Kesejahteraan sosial adalah suatu cara kehidupan dan penghidupan sosial, materil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya.
3. Jaminan Sosial adalah suatu sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat, guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.
4. Kemitraan adalah suatu bentuk hubungan timbal balik, saling menguntungkan yang terjalin berdasarkan kepedulian, kesetaraan

dan kebersamaan yang bersinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

5. Program adalah rincian kegiatan yang disusun secara sistematis, terarah dan terencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
6. Perlindungan sosial adalah upaya pemerintah dan atau masyarakat untuk memberi kemudahan pelayanan sektor informal dari musibah sakit, kecelakaan atau meninggal dunia.
7. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia/jompo terlantar dan cacat ganda dapat hidup secara wajar.
8. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengalaman masa lalu telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, bahwa pembangunan yang dilaksanakan dengan pendekatan *top-down* dengan sistem sentralistis, tidak berhasil di bidang sosial maupun politik; meskipun di bidang ekonomi cukup menggembirakan. Implementasi pendekatan dan sistem pembangunan tersebut mengakibatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, bukan dalam pengertian partisipasi, tetapi lebih pada dimobilisasi. Karena itu, kegiatan pembangunan makin menjadikan masyarakat bergantung terhadap input-input dari pemerintah. Masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif dan tidak inovatif.

Secara politik, dengan pendekatan *top-down* dan sistem sentralistis tersebut hak-hak masyarakat terserap ke dalam kepentingan pemerintah, sehingga tidak muncul pemikiran kritis dari masyarakat sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memudar diakibatkan oleh memudarnya sejumlah lembaga tradisional yang dulu hidup di perdesaan, sebagai akibat intervensi pemerintah yang terlalu jauh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Respon terhadap pendekatan pembangunan tersebut, berkembang diskusi tentang *civil society* di kalangan perguruan tinggi maupun organisasi non pemerintah. Wacana *civil society* ini tampaknya menyadarkan para penyelenggara negara, untuk menemukan pendekatan baru dalam kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat, dengan mengedepankan demokratisasi dan hak asasi

manusia. Berbagai seminar, semiloka dan *workshop* dilaksanakan oleh berbagai pihak untuk merumuskan model pembangunan yang mengakomodasi konsep *civil society* tersebut.

Terkait dengan wacana *civil society* ini berkembang pemikiran, bahwa untuk mewujudkan bangsa yang demokratis, harus dimulai dari bawah atau dari masyarakat akar rumput. Karena berdasarkan pengalaman, masyarakat akar rumput tersebut selama berabad-abad telah terjadi praktek-praktek demokrasi yang benar. Dengan demikian, apabila bangsa Indonesia menghendaki terwujudnya pembangunan demokrasi, perlu belajar kembali tentang kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat akar rumput. Sehubungan dengan itu, penelitian ini perlu dilakukan dalam upaya (1) mendiskripsikan profil organisasi pengelola BKSP yang meliputi aspek organisasi, kegiatan dan jaringan kerja, dan (2) peranan organisasi pengelola BKSP dalam pembangunan masyarakat. Hasil penelitian ini akan menjadi bahan masukan dalam rangka pemberdayaan organisasi pengelola BKSP dalam pembangunan masyarakat yang lebih optimal.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bagian ini akan memberikan penjelasan mengenai keadaan, luas, letak dan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk mengenal lebih jauh daerah, tempat yang menjadi objek penelitian.

1) Proses Pembentukan dan profil Yayasan Sosial

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat kehidupan perekonomian yang masih rendah, masih banyak yang digolongkan sebagai masyarakat lemah. Lemahnya kondisi ekonomi masyarakat disebabkan antara lain,

karena rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya pengetahuan dan terbatasnya produktivitas yang dihasilkan. Dengan kenyataan seperti itu, muncul beberapa kebijakan pemerintah dalam bentuk program kesejahteraan sosial seperti program Inpres Desa Tertinggal, Program Kesejahteraan Keluarga serta Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama.

Berbicara mengenai masyarakat ekonomi lemah, bukan berarti masyarakat tersebut tidak punya “*apa-apa*” untuk terus hidup dan berkembang dalam kehidupannya. Mereka masih punya “potensi” yang mungkin masih dapat dikembangkan/ diberdayakan Oleh karena itu mereka butuh “kekuatan” yang dapat mendampingi, dalam rangka pemberdayaan potensi yang ada pada masyarakat desa.

Suatu gejala yang biasa muncul dalam masyarakat berkembang adalah terbentuknya suatu wadah yang dapat menampung aspirasi masyarakat; wadah tersebut biasanya merupakan sebuah lembaga formal seperti Kelompok Swadaya Masyarakat. Lembaga swadaya ini bisa berupa suatu organisasi sosial yang berbadan hukum dimana operasionalnya sampai di tingkat atas, tergantung dari jaringan kerja/*networking* dari pengurus yayasan tersebut. Semua itu merupakan suatu wadah dalam masyarakat yang terbentuk untuk memberdayakan potensi masyarakat sebagai upaya peningkatan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan pula taraf kesejahteraan kehidupannya atau sebagai jaminan sosial yang ada di wilayahnya.

Yayasan Kartika Sejahtera yang terletak di jalan Mustafa Kelurahan Rappokalling tepatnya di bawah jembatan tol ini didirikan pada tanggal 7 Juli 2000 oleh bapak Drs. Kamrin, M.Si dan bapak Syahrudin Abbas

yang juga sampai saat ini masih menjabat sebagai ketua dan sekretaris Yayasan Kartika Sejahtera.

Tujuan didirikannya Yayasan ini adalah :

- 1) Memberikan motivasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah sosial, ekonomi serta memungkinkan untuk mengatasinya melalui bimbingan dan pelatihan.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita, perbaikan gizi, meningkatkan kesejahteraan dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kualitas dan keseimbangan.
- 3) Melayani kebutuhan yang dirasakan dan diungkapkan oleh masyarakat dengan upaya-upaya pengembangan kemandirian dan pemanfaatan sumber daya yang ada.
- 4) Mempelajari pembangunan pedesaan berwawasan agrobisnis dan mengembangkan komoditas andalan.
- 5) Turut mensukseskan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor di pedesaan maupun di perkotaan

Yayasan Taka Bonerate yang terletak di jalan Veteran ini didirikan oleh bapak Drs. Muhtar, MM dan bapak Ir. Wajar serta bapak Unjung, SE. Yayasan ini didirikan pada tahun 2002 dengan tujuan pendiriannya adalah :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan anggota pada umumnya.
2. Ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah khususnya masalah pengangguran dan kemiskinan.

Yayasan sosial Taka Bonerate telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial diantaranya seperti sumbangan bagi kematian, santunan

lanjut usia. Disamping itu ada juga pinjaman modal bagi penduduk yang ingin berdagang kecil-kecilan. Lembaga sosial ini masih tergolong baru karena operasional secara resmi mulai awal tahun 2003.

Kedua Yayasan Sosial tersebut telah melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial melalui organisasinya. Menurut responden yang diambil dari 2 lembaga tersebut jenis kegiatan yang dilakukan meliputi: (a) Pelayanan lanjut usia dan Jompo terlantar (b) pelayanan kematian (c) Pelayanan anak-anak penyandang masalah Kesejahteraan Sosial seperti yatim atau piatu (d) Pelayanan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

2. Demografi

Penduduk kota Makassar tahun 2006 tercatat sebanyak 1.223.540 jiwa yang terdiri dari 611.049 laki-laki dan 612.491 perempuan. Jumlah penduduk kota makassar tahun 2004 tercatat sebanyak 1.148.312 jiwa.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Makassar 2006

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Mariso	26.752	26.562	53.314
2	Mamajang	29.745	29.223	58.968
3	Tamalate	74.839	73.750	148.589
4	Rappocini	69.228	70.263	139.491
5	Makassar	39.883	40.991	80.874
6	Ujung Pandang	13.814	14.127	27.941
7	Wajo	17.170	17.008	34.178
8	Bontoala	29.497	30.779	60.276
9	Ujung Tanah	24.215	23.052	47.267
10	Tallo	67.186	64.972	132.158
11	Panakukang	64.446	66.783	131.229
12	Manggala	48.281	48.351	96.632
13	Biringkanaya	62.738	62.898	125.636
14	Tamalanrea	43.255	43.732	86.987
JUMLAH		611.049	612.491	1.223.540

Sumber ; BPS Makassar 2007

Ditinjau dari kepadatan penduduk per km² kecamatan Tamalate yang terpadat yaitu 148.589, disusul kecamatan Tallo 132.158, kecamatan Panakukang 131.229, sedang kecamatan ujungpandang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 27.941, kemudian kecamatan Wajo 34.178, kecamatan Ujung tanah 47.267, kecamatan mariso 53.134 jiwa dan kecamatan mamajang 58.968. Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di tiga kecamatan yaitu : Biringkanaya, Tamalanrea dan Manggala.

Tidak meratanya pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan ini, antara lain disebabkan kawasan kota lama sudah tidak memungkinkan lagi dilaksanakan pengembangan fisik secara horizontal.

Di salah satu sisi kawasan pengembangan kota masih tersedia lahan luas. Selain dari pada itu, perkembangan sarana dan prasarana perkotaan, sudah cukup berkembang dikawasan pengembangan kota sehingga mendorong sebagian penduduk terutama yang berpenghasilan menengah kebawah untuk bertempat tinggal di kawasan ini.

Kondisi ini diharapkan agar sesuai dengan rencana master plan kota yang ada, pola penyebaran penduduk, dan tingkat pelayanan fasilitas perkotaan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan kota lama, tetapi menyebar keseluruh bagian kota sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Demikian pula tatacara pola bermata pencahariannya agar tertata dan terkendali.

Penduduk kota Makassar yang telah berusia lanjut tercatat sebanyak 55.935 jiwa sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Lanjut Usia di Kota Makassar tahun 2006

No	Kecamatan	Usia 60-64 Tahun		Usia 65+		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	Tamalate	1.319	1.364	1.595	2.059	6.337
2	Biringkanaya	905	1.408	1.062	1.408	4.783
3	Makassar	846	1.173	1.433	1.988	5.440
4	Mamajang	686	833	1.095	1.389	4.003
5	Wajo	450	528	677	1.018	2.673
6	Tallo	1.425	1.843	2.377	3.170	8.815
7	Bontoala	649	794	917	1.329	3.689
8	Ujung Tanah	436	501	597	815	2.349
9	Mariso	514	681	873	1.304	3.372
10	Tamalanrea	582	579	555	774	2.490
11	Manggala	729	811	852	1.211	3.603
12	Rappocini	86	82	86	108	362
13	Ujungpandang	376	453	622	932	2.383
14	Panakuk kang	1.102	1289	1.415	1.821	5.636
Jumlah		10.105	12.348	14.156	19.326	55.935

Sumber : Data BPS Makassar 2006

Dari tabel diatas, menggambarkan bahwa kecamatan yang paling banyak penduduk lansia adalah kecamatan Tallo dengan 8.815 jiwa disusul kecamatan Tamalate 6.337 jiwa, dan kecamatan Panakukkang dengan 5.636 jiwa, sedangkan yang paling sedikit jumlah penduduk lansia adalah kecamatan Rappocini dengan jumlah 362 jiwa kemudian kecamatan Ujungtanah 2.349 jiwa dan kecamatan Ujungpandang 2.383 jiwa

B. Fungsi Organisasi Pengelola BKSP

1. Pendampingan sosial sebagai strategi pemberdayaan masyarakat miskin.

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para

pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan semangat maupun perspektif profesional. Para pekerja sosial ini berperan sebagai pendamping sosial.

Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka.

Dalam kasus yang penulis teliti, terlihat bahwa masyarakat yang menjadi klien dari yayasan Taka Bonerate sering menghadapi hambatan internal dan eksternal, seperti hasil wawancara dengan ketua yayasan Taka Bonerate (Drs. Muhtar, MM) bahwa kadangkala mereka ingin menyuarkan aspirasinya tetapi mereka takut dan merasa dirinya “seolah-olah” tidak mampu untuk berhadapan dengan dunia luar. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa suara mereka sebagai rakyat kecil tidak akan didengar oleh mereka yang berada diatas. Disinilah fungsi yang dijalankan sangat penting bagi pendamping sosial untuk berperan melakukan pendampingan serta memberikan semangat dan motivasi untuk agar masyarakat yang sebagian besar hidup dibawah garis kemiskinan itu menjadi lebih berdaya dan lebih percaya diri dengan apa yang akan mereka lakukan.

Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti; (a) merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, (b) memobilisasi sumber daya setempat (c) memecahkan masalah sosial, (d) menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan (e) menjalin kerjasama

dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Dalam kasus yayasan Taka Bone Rate dan yayasan Kartika Sejahtera, peneliti melihat peran dari pendamping ini sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan, karena selain sebagai pengelola BKSP, mereka juga bertindak sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

a. Fasilitator.

Penulis dalam melakukan wawancara terhadap Drs. Kamrin, M.Si dalam kapasitasnya selaku ketua yayasan Kartika Sejahtera mengatakan bahwa selain menjadi penyalur bantuan BKSP, juga berfungsi dan memainkan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

Dari wawancara tersebut penulis dapat menjelaskan bahwa pengelola BKSP selain sebagai penyalur dana bagi masyarakat yang menjadi klien, juga bertindak sebagai motivator yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi bagi masyarakat miskin di sekitarnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, begitupula dengan pemberian kesempatan dan dukungan bagi masyarakat, semua ini dilakukan agar masyarakat lebih mengetahui bahwa mereka tidaklah harus senantiasa takut dan

seolah merasa dirinya tidak mampu dalam memperjuangkan sendiri hak-haknya sebagai warga negara.

b. Pendidik.

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap masyarakat yang menjadi klien dari yayasan Taka Bonerate yang bernama Daeng Mampa (65 tahun) pekerjaan menjual barang campuran bersama dengan istrinya dan berasal dari selayar mengungkapkan bahwa masyarakat yang selama ini didampingi oleh pengelola yayasan, sering melakukan diskusi-diskusi kecil yang dijadikan sebagai media yang sangat tepat untuk saling bertukar pengalaman dan juga masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

Dengan demikian peran pendamping sebagai pendidik sangat membantu masyarakat menyelesaikan sendiri masalahnya untuk menjadi lebih berani dalam menghadapi berbagai persoalan yang mereka hadapi.

c. Perwakilan masyarakat.

Selain sebagai motivator dan pendidik, pengelola BKSP ini juga berperan sebagai perwakilan masyarakat dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Syahrudin

Abbas dalam kapasitasnya selaku sekretaris yayasan Kartika Sejahtera mengatakan bahwa selain sebagai pengurus yayasan, juga berperan dalam pekerja sosial yang bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja dengan dunia luar. Ini semua bertujuan agar masyarakat yang didampingi dapat menjadi lebih berdaya dengan bantuan dari semua stakeholder yang terlibat.

Hasil wawancara penulis dengan klien Yayasan Taka Bonerate yang bernama Hanaping (52 tahun) mengatakan :

....."yayasan ini sangat berfungsi sebagai wakil kami di pemerintah pak, dimana kalau ada keinginan yang akan kami sampaikan senantiasa kami beritahu dulu ke pihak yayasan yang kemudian di teruskan kepada yang diatas.....

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan yayasan sangat berfungsi dalam hal melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini kemudian yang menjadi acuan bagi peneliti dalam menentukan salah satu indikator keberhasilan yayasan pengelola BKSP ini.

d. Peran-peran teknis.

Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi 'manajer perubahan' yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Jenis Pendamping

Pendamping dalam kegiatan BKSP terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Pendamping bidang pengembangan usaha

Petugas pendamping berasal dari unsur swasta atau pemerintah dengan kompetensi sebagai berikut :

- a. Berjiwa wiraswasta dan memiliki pergaulan/akses yang luas dalam hal pengembangan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kedua kasus yayasan menunjukkan bahwa para pengurus/pengelola yayasan sebelum menjadi pengurus telah mempunyai usaha-usaha yang sifatnya mandiri. Hal ini dapat dilihat pada bapak Drs. Muhtar, MM selaku ketua yayasan Taka Bonerate yang mempunyai usaha konveksi yang cukup berkembang, begitupula dengan ketua yayasan Kartika Sejahtera yaitu bapak Drs. Kamrin, M.Si yang telah mempunyai usaha simpan pinjam dan usaha perkreditan.

- b. Bereputasi baik, yaitu orang yang dikenal baik oleh masyarakat dan mempunyai perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat serta dapat menjadi tauladan.
- c. Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan usaha atau seseorang yang memiliki pengalaman berwiraswasta dan berhasil dibidangnya.

Hasil penelitian di kedua yayasan menunjukkan para pengelola yayasan yang sebelumnya mempunyai bidang usaha yang seperti konveksi maupun usaha simpan pinjam telah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga kursus di kota Makassar dan juga ditunjang oleh latar pendidikan yang memadai dan sejalan dengan usaha yang mereka lakukan.

- d. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjalin relasi dengan berbagai pihak terutama dunia usaha.

2. Pendamping bidang penyantunan

Yayasan Taka Bonerate maupun Yayasan Kartika Sejahtera juga bertugas sebagai pendamping bidang penyantunan. Petugas pendamping bidang penyantunan ini berasal dari pekerja sosial masyarakat, dengan kompetensi sebagai berikut :

- a. Berjiwa sosial yaitu mempunyai hasrat yang tinggi untuk membantu orang lain yang kurang mampu, rentan, dan bermasalah serta mempunyai jiwa suka bergaul dengan berbagai kelompok masyarakat.
- b. Bermotivasi tinggi, yaitu mempunyai semangat juang yang tinggi untuk melaksanakan tugas yang diemban.
- c. Bereputasi baik, yaitu orang yang dikenal baik oleh masyarakat dan mempunyai perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat serta dapat menjadi teladan.
- d. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjalin relasi sosial yang harmonis dengan berbagai pihak di lingkungan masyarakat.

Bagi para pekerja sosial di lapangan, kegiatan pemberdayaan di atas dapat dilakukan melalui pendampingan sosial. Kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan oleh yayasan Taka Bonerate dan Yayasan Kartika sejahtera dalam melakukan pendampingan sosial:

1) Motivasi.

Pada kedua kasus baik yayasan Taka Bonerate maupun Kartika Sejahtera berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Kamrin, Msi dan juga Drs. Muhtar, MM menunjukkan bahwa para pengelola dalam melakukan pendampingan sosial senantiasa mendukung dan terus melakukan motivasi kepada klien BKSP, dengan demikian diharapkan para keluarga miskin dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi

sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Rumah tangga miskin perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan di kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan.

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar pemasyarakatan. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Ibu Nurhaedah sebagai bendahara yayasan Kartika Sejahtera dalam wawancaranya menjelaskan bahwa pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini sudah pernah dilakukan di yayasan Kartika Sejahtera, dengan tujuan agar dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan matapencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

3) Manajemen diri. Kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok

kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

- 4) Pembangunan dan pengembangan jaringan. Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Kegiatan Organisasi Pengelola BKSP

Pencermatan terhadap kegiatan organisasi pengelola BKSP ini perlu dilakukan, dalam upaya menemukenali bidang-bidang apa saja yang telah dilaksanakan oleh organisasi pengelola BKSP. Seberapa besar aktivitas di bidang kesejahteraan sosial menjadi perhatian organisasi pengelola BKSP. Dengan pengetahuan mengenai jenis kegiatan, dapat diketahui besarnya kontribusi organisasi pengelola BKSP tersebut di bidang sosial kemasyarakatan, khususnya di bidang kesejahteraan sosial.

Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial yang dilakukan di kedua kasus yayasan Taka bonerate dan yayasan Kartika Sejahtera seperti santunan lanjut usia terlantar, santunan orang cacat, penyuluhan sosial, penyantunan anggota yang mengalami musibah.

Kegiatan organisasi di bidang usaha kesejahteraan sosial (UKS) tersebut di atas merupakan gambaran bahwa kegiatan UKS menjadi perhatian masyarakat akar rumput. Dari hasil wawancara dengan bapak Unjung, SE dalam kapasitasnya sebagai bendahara yayasan Taka

Bonerate terungkap bahwa masyarakat yang menjadi klien sangat mengharapkan bantuan yang akan didapatkan dari yayasan. Tetapi pengelola sendiri mempunyai syarat untuk dapat menerima bantuan yang akan diberikan yang sesuai dengan Kepmensos no.51/HUK/2003, yaitu kepada orang lanjut usia terlantar, orang cacat fisik dan mental terlantar, penyandang eks penyakit kronis dan penyandang psikotik. Dari jenis sasaran pelayanan sosial tersebut, pada umumnya organisasi pengelola BKSP menjangkau penyandang masalah konvensional. Jenis-jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut, yaitu (1) lanjut usia, (2) keluarga miskin, dan (3) penyandang cacat.

Meskipun demikian, apa yang telah dilakukan oleh organisasi pengelola BKSP tersebut perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah, karena mereka telah memberikan sumbangan yang nyata dan bermakna dalam pembangunan masyarakat lokal.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pengrajin kue, pembuatan makanan, pedagang kaki lima. Pencermatan terhadap jenis-jenis kegiatan di bidang ekonomi tersebut, menggambarkan bahwa organisasi pengelola BKSP di samping melaksanakan kegiatan di bidang sosial, juga melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi. Dilihat dari jenis-jenis kegiatannya, pada umumnya kegiatan ekonomis yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Apa yang dilakukan organisasi di bidang ekonomi ini, merupakan respon terhadap kebijakan pemerintah yang selama ini lebih berpihak investor atau konglomerat. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi kerakyatan ini, organisasi pengelola BKSP perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan kegiatannya secara berkesinambungan.

Mencermati berbagai jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi pengelola BKSP yayasan Taka Bonerate tersebut, menunjukkan bahwa organisasi pengelola BKSP Taka Bonerate telah menjangkau semua sektor kehidupan masyarakat, yaitu di bidang ekonomi berupa pemberdayaan dan pelatihan masyarakat agar lebih mandiri dan mampu menghasilkan pendapatan sendiri melalui usaha kaki lima maupun usaha pembuatan kue dan pembuatan makanan, dibidang sosial budaya berupa fasilitator, motivasi dan pengembangan manajemen diri, dan mental spiritual berupa kegiatan pendampingan terhadap penyandang masalah psikopat. Bahkan yang menarik, organisasi pengelola BKSP telah menjangkau para penyandang masalah sosial di lingkungannya. Hal ini merupakan fenomena gerakan *civil society* di tingkat masyarakat akar rumput yang merupakan modal sosial bagi upaya pembangunan. Apabila gerakan *civil society* akar rumput ini memperoleh iklim yang kondusif, maka demokrasi pada tingkat lokal akan berkembang yang pada akhirnya akan mengembangkan demokrasi pada tingkat yang lebih luas. *Civil society* sebagai instrumen pembangunan demokrasi ini perlu dijadikan sebuah kerangka pikir semua pihak (*stakeholders*), sehingga aktivitas pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat seiring dengan dinamika perubahan sosial.

Peranan Organisasi Pengelola BKSP

Berbagai peranan telah dilaksanakan oleh yayasan Taka Bonerate dan Yayasan Kartika Sejahtera sebagai organisasi pengelola BKSP pada tingkat akar rumput, yaitu :

1. Informasi

Organisasi pengelola BKSP menyajikan data sejumlah permasalahan dan kebutuhan masyarakat lokal, baik menyangkut permasalahan

ekonomi dan sosial budaya, dan mencoba menemukan alternatif pelayanan sosial yang dibutuhkan. Data permasalahan dan kebutuhan masyarakat di dua kasus yayasan Taka Bonerate dan yayasan Kartika Sejahtera berdasrakan hasil wawancara penulis dengan Syahrudin Abbas selaku sekretaris yayasan Kartika Sejahtera dan juga dengan Unjung, SE selaku bendahara yayasan Taka Bonerate, dalam bidang ekonomi berupa kurangnya dana untuk dijadikan sebagai modal pengembangan usaha. Inilah yang kemudian bagi para pengelola BKSP untuk mencari sumber-sumber pendanaan yang akan di berikan kepada para klien dikedua yayasan, kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan mereka sendiri. Di bidang sosial budaya dimana masyarakat masih enggan atau dengan kata lain masih takut untuk membuka diri dari pihak luar, peran pendamping disini sebagai pendidik, bagaimana membangkitkan kesadaran masyarakat dan bersama-sama menghadapi masalah.

2. Mediasi

Kadangkala terjadi ketidak sesuaian antara kebijakan pemerintah lokal dengan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Adanya kesenjangan ini akan menyebabkan “terjadinya konflik” antara kepentingan pemerintah lokal dengan kebutuhan masyarakat. Pada batas-batas tertentu, masyarakat tidak akan mendukung kegiatan pembangunan yang berasal dari pemerintah. Hal situasi ini, organisasi menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan kepentingan pemerintah lokal.

Hasil wawancara penulis dengan Drs. Muhtar, MM, menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi klien di yayasan Taka Bonerate

sampai saat ini belum pernah terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah kota, tapi jika di kemudian hari hal seperti ini tidak bias dihindari maka sebagai pengurus yayasan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan akan tetap melakukan pendampingan serta menjadi mediasi bagi kedua kelompok yang bertikai tersebut.

3. Advokasi

Organisasi mewakili kepentingan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya dari pihak-pihak tertentu. Ketika ada pihak lain (pemerintah lokal, pengusaha/ developer dll) yang menawarkan program kepada masyarakat, namun program tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat, maka organisasi pengelola BKSP atas nama masyarakat lokal akan melakukan upaya pembelaannya. Seperti misalnya dalam pembebasan tanah untuk kepentingan perumahan atau industri, atau pembangunan industri yang polusinya dirasakan oleh masyarakat.

4. Pemberdayaan

Organisasi pengelola BKSP melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi masyarakat. Dengan adanya upaya pemberdayaan oleh organisasi pengelola BKSP, maka masyarakat secara swadaya dapat menyelesaikan permasalahannya, baik menyangkut bidang ekonomis maupun sosial budaya dan politik.

Hasil wawancara penulis dengan Ir. Wajar selaku sekretaris yayasan Taka Bonerate menjelaskan bahwa yayasan sosial dalam melakukan pemberdayaan senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat miskin serta mendorong mereka untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan

masyarakat disekitarnya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

Manfaat Organisasi Pengelola BKSP

Berdasarkan berbagai peranan tersebut, manfaat organisasi pengelola BKSP bagi anggota, masyarakat dan pemerintah adalah :

a. Manfaat ekonomis.

Organisasi pengelola BKSP didirikan dalam upaya peningkatan ekonomi anggota/masyarakat. Hasil wawancara dengan Drs. Muhtar, MM selaku ketua yayasan Taka Bonerate mengatakan bahwa dalam kerangka ini, yayasan berupaya untuk meningkatkan kemampuan anggota/ masyarakat untuk memperoleh pelayanan sosial dasar secara optimal. Untuk itu, beberapa program dan kegiatan usaha ekonomis dilaksanakan oleh organisasi, seperti simpan pinjam dan pelatihan keterampilan atau usaha ekonomis. Dengan demikian, ada peranan dan kontribusi organisasi pengelola BKSP/yayasan Taka Bonerate terhadap pembangunan, khususnya dalam peningkatan kemakmuran masyarakat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sitti Rabiah (65 tahun) mengatakan bahwa :

.....”adanya yayasan ini sangat membantu saya, terutama dalam hal kebutuhan sehari-hari, pekerjaan saya hanyalah sebagai pencuci pakaiannya orang dengan penghasilan yang tidak seberapa, kalau saya sakit pernah juga dapat bantuan berupa jps, pernah juga dapat zakat tapi yang sangat saya butuhkan pak bantuan untuk makan sehari-hari”.....

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yayasan sosial pengelola BKSP ini sangat membantu para kelayannya terutama

dalam hal bantuan yang bersifat ekonomis. Ini juga yang kemudian menjadi salah satu faktor mengapa para kelayaan sangat berharap agar bantuan yang di berikan dapat di beri tambahan modal untuk dipakai berusaha agar tingkat perekonomian mereka juga dapat meningkat.

b. Manfaat mental spiritual

Kegiatan pembangunan sangat memerlukan kapasitas mental-spiritual masyarakat, di samping kapasitas intelektual. Dengan adanya kapasitas mental-spiritual ini, maka pembangunan masyarakat dapat dilaksanakan dengan percaya diri dan jiwa keswadayaan. Adanya kesadaran kolektif bahwa melaksanakan pembangunan itu sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus. Dengan adanya kesadaran kolektif ini, maka muncul dorongan kolektif untuk melaksakan pembangunan tanpa menunggu input-input dari pemerintah. Untuk itu, dilaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan mental spritual.

Hasil wawancara penulis dengan Drs. Muhtar, MM selaku ketua Yayasan taka Bonerate terungkap bahwa kehadiran yayasan sosial ini di tengah-tengah masyarakat akan sangat membantu mereka bukan hanya dari segi ekonomi mereka tetapi juga sangat bermanfaat bagi mental spritual mereka. Kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak yayasan antara lain mendorong mereka menjadi lebih mandiri dengan cara bantuan modal untuk usaha-usaha mereka sehingga dengan adanya kegiatan ekonomi maka mereka akan menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung dengan siapapun. Begitu pula dengan kegiatan amaliah ramadan, sebagai pengurus yayasan senantiasa mendorong

mereka untuk lebih giat melakukan amalan-amalan termasuk diantaranya pihak yayasan memberikan zakat dan sedekah pada setiap akhir ramadhan.

c. Manfaat sosial budaya

Ketahanan sosial masyarakat dapat dicermati antara lain dari pola interaksi sosial yang dikembangkan antar warga masyarakat. Pola interaksi ini selanjutnya akan menggambarkan kualitas interaksi antar warga masyarakat tersebut. Pada masyarakat di perkotaan yang multikultur, seringkali ada permasalahan dalam mengembangkan pola interaksi ini karena adanya perbedaan nilai sosial budaya. Keberadaan organisasi akan melaksanakan fungsi mediasi dan informasi bagi masyarakat dalam pengembangan pola interaksi dalam masyarakat multi kultur tersebut. Dengan demikian, perbedaan persepsi masyarakat dari etnis tertentu terhadap etnis lain dapat “di cairkan”, sehingga tidak sampai terjadi konflik sosial.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Yayasan Pengelola BKSP

1. Faktor Pendukung

a. Partisipasi Masyarakat

Selain hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat seperti dipaparkan di atas, terdapat pula kewajiban bagi masyarakat, yang dibebankan oleh UU No.6 tahun 1974, untuk ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikedua yayasan tersebut, bentuk-bentuk bantuan dari masyarakat itu antara lain masyarakat dapat membentuk dan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi warga miskin, nilai kegotongroyongan, keswadayaan dan kesetiakawanan sosial yang masih tinggi juga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat.

Ada beberapa peraturan yang telah dibuat untuk memfasilitasi kewajiban masyarakat tersebut. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberikan wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana. Pasal 12 PP 42/1981 juga memfasilitasi kewajiban ini dengan memberikan kemungkinan bagi organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial untuk mendapatkan bantuan subsidi.

Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bukanlah satu-satunya bentuk partisipasi masyarakat. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, juga dibutuhkan kontrol sosial dari masyarakat terhadap kewajiban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan sosial ini. Kritik langsung dan peranan insan pers akan selalu dibutuhkan untuk mencegah adanya kebocoran-kebocoran dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

Disamping itu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan manifestasi dari sebuah tindakan sosial rasional yang mengandung tujuan tertentu. Tujuan dimaksud adalah masalah ketahanan sosial yang dapat diatasi dan dicegah melalui kekuatan dan kemampuan untuk menolong orang lain yang memiliki masalah tertentu, karena partisipasi masyarakat lebih mengutamakan keberlanjutan dari upaya mengembangkan aksi dan pengambilan keputusan secara kolektif.

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tiga unsur yakni: (a) partisipasi masyarakat disetiap kelurahan/desa merupakan alat memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap

masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya, program jaminan sosial akan gagal; (b) masyarakat lebih mempercayai program yang tumbuh dari bawah, jika merasa dirinya dilibatkan dalam proses persiapan hingga pemeliharannya; (c) merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam setiap program masyarakat. Jaminan sosial yang dimaksud adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial (Pedoman Umum Program Jaminan Sosial). Sistem jaminan sosial yang berbasiskan komunitas lokal yang tumbuh dari masyarakat golongan lemah secara tradisional telah mulai berkembang pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluhan dengan cara partisipatif.

Hasil penelitian pada yayasan Taka Bonerate dan yayasan Kartika Sejahtera menunjukkan bahwa model semacam ini dilakukan masyarakat untuk menangani kantong-kantong kemiskinan diberbagai wilayah lokal dengan mengandalkan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Model ini mengisyaratkan pentingnya penguatan yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk menangani masalahnya sendiri atas dasar kemampuannya sendiri melalui sebuah sistem jaminan sosial yang dikelola dari yayasan dan untuk mereka. Sistem jaminan sosial berbasis komunitas lokal tidak saja bersifat reaktif terhadap keadaan darurat, akan tetapi bersifat strategis karena program ini telah dipersiapkan landasannya berupa institusi masyarakat untuk memajukan masyarakat di masa mendatang. Kegiatan tersebut dimungkinkan untuk menjamin pemeliharaan sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat lokal atas dasar

keswadayaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Yayasan Taka Bonerate, Drs. Muhtar, MM bahwa ;

”kami pengurus yayasan Taka Bonerate sebelum di mulainya program ini, terlebih dahulu dipanggil oleh instansi sosial untuk sosialisasi petunjuk pengelolaan usaha BKSP ini. Kami hadir dan tertarik dengan program ini karena rasa kepedulian sosial kami terhadap masyarakat sekitar yang tidak mampu secara ekonomi.....”

Dari penjelasan pengurus yayasan Taka Bonerate diatas, terlihat bahwa salah satu faktor yang sangat membantu program BKSP ini adalah adanya partisipasi masyarakat dari bawah (*bottom up*) untuk melaksanakan program ini dengan sukarela karena niat yang tulus untuk membantu masyarakat sekitarnya yang tidak mampu secara ekonomi dengan menjadi pendamping dalam pemberdayaan ekonominya. Ini terlihat dari hasil penelitian penulis di kedua yayasan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang akan menerima bantuan memberikan informasi kepada pengurus yayasan dalam melakukan pendataan terhadap para penerima bantuan ini.

Sedangkan tanggapan dari klien atau kelayaan tentang bantuan kesejahteraan sosial permanen ini dari hasil penelitian didapatkan bahwa Anwar Hanafi (65 tahun) mengatakan bahwa :

.....dalam melakukan penyerahan bantuan, kami sebagai penerima langsung didatangi oleh pihak yayasan untuk memberikan bantuannya, sehingga kami tidak merasa kuatir atau curiga bahwa bantuan kami ini akan dipotong oleh orang-orang yang itdak bertanggung jawab.....

Hasil wawancara tersebut menyimpulkan bahwa klien atau kelayaan mengetahui tentang adanya bantuan kesejahteraan sosial permanen ini, langsung dari pengelola yayasan, selain itu mereka juga berpendapat bahwa mereka akan tetap mengontrol bantuan ini sehingga

para klien betul-betul orang yang layak untuk menerima. Ini memperlihatkan bahwa adanya bantuan kesejahteraan sosial permanen ini lebih banyak diketahui oleh klien dari pengelola BKSP itu sendiri yang turun tangan untuk langsung mendata warga yang memang layak untuk mendapatkan bantuan ini.

Fungsi pendamping yang di perankan oleh pengurus yayasan tersebut sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Drs.Muh.Kamrin, M.Si dalam posisinya sebagai ketua Yayasan Kartika Sejahtera ;

”Sebagai pengurus yayasan sosial, kami menganggap bahwa masyarakat miskin merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya, disinilah kami pendamping sosial hadir sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang mereka hadapi”.....

Dari uraian tersebut, permasalahannya adalah seberapa besar sebenarnya sistem jaminan sosial berbasis komunitas lokal memberikan manfaat kepada lingkungan sosialnya. Hal ini dipandang sampai saat ini belum banyak penelitian atau kajian tentang pola jaminan sosial yang ada di masyarakat golongan bawah, inilah yang kemudian menjadi daya dorong bagi penulis untuk mengadakan penelitian/kajian. Kajian ini hanya menguraikan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi sosial yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dalam kaitannya dengan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat.

b. Transparansi

Langkah transparansi harus segera dilakukan agar efisiensi bantuan dapat terjamin, seperti yang dikatakan oleh bapak Unjung ,SE (bendahara yayasan Taka Bonerate) bahwa ;

”.....adanya transparansi sangat dibutuhkan dalam proses pemberian bantuan ini untuk memberikan kepastian bahwa dana bantuan telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya”

Masyarakat pemberi dana, yaitu penyumbang maupun seluruh masyarakat sebagai pembayar pajak kepada negara, yang dananya digunakan untuk kesejahteraan sosial, berhak untuk mengetahui apa yang terjadi pada dana yang telah mereka berikan. Sementara masyarakat yang berhak menerima dana tersebut juga berhak atas transparansi, untuk memastikan bahwa hak mereka atas kesejahteraan sosial tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya.

Hasil penelitian dari para klien menunjukkan bahwa bantuan atau santunan yang diberikan oleh pengurus/pengelola BKSP sebagian besar pengelola yayasan memberikan bantuan berupa uang karena lebih praktis dan uang itu dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan klien, seperti yang dikatakan oleh ibu Nurhaedah (bendahara yayasan kartika sejahtera) bahwa ;

”Kami sebagai pengelola yayasan dalam memberikan bantuan biasanya berupa uang, karena bagi kami lebih praktis dan efisien serta dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan klien kami apakah nantinya mau di belikan barang dan sebagainya.....”

Begitupula dengan bantuan yang diberikan kepada klien, pihak pengelola sendiri yang mengantar langsung kerumah kelayaan, ini dimaksudkan agar bantuan yang diberikan itu betul-betuk sampai

kepada yang berhak untuk mendapatkan/mebutuhkannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan tanggapan responden tentang bagaimana memperoleh bantuan yang diberikan dijelaskan bahwa yang menjawab bantuan yang diberikan oleh yayasan tersebut diberikan langsung oleh pengelola atau dengan mendatangi klien. Semua klien menjawab demikian karena pengelola berasumsi bahwa apabila diberikan atau dititip sama orang lain akan berpotensi untuk terjadi hal yang tidak diinginkan seperti bantuan yang diberikan tidak sampai pada yang berhak. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Drs. Muhtar, MM selaku ketua yayasan takabonerate bahwa;

“dalam penyaluran bantuan, sedapat mungkin kami memberikan atau mendatangi langsung kelayaan, ini dimaksudkan agar bantuan ini sampai pada orang yang tepat sasaran....”

Masalah pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial ini sangat mendesak untuk segera dituntaskan. Konstitusi kita sendiri telah mengakomodasi hak atas kesejahteraan sosial. Para pendiri bangsa ini telah tidak melupakan hak dasar ini, akankah kita generasi sekarang justru melupakannya.

c. Kebijakan dan Strategi

Penanganan fakir miskin di wilayah Makassar diarahkan pada upaya membangun daya para penerima manfaat program, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta mengembangkannya dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Selain itu juga berusaha menciptakan iklim yang kondusif, baik yang menyangkut berbagai input serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities), sehingga menjadikan fakir

miskin penerima manfaat program semakin berdaya. Untuk itu penanganan yang diberikan meliputi :

1) Penumbuhan dan Pengembangan Perilaku Ekonomi Produktif

Perilaku ekonomis produktif dalam hal ini adalah perilaku yang berorientasi pada pertimbangan-pertimbangan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber yang ada dengan biaya/usaha minimal guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Usaha nyata yang diperoleh, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan di kedua lokasi penelitian telah dilakukan pelatihan dan senantiasa klien di beri motivasi untuk mengembangkan dan memberdayakan jiwa usaha dari masyarakat. Ini menjadi penting karena masyarakat sendirilah yang akan merasakan manfaat dari kegiatan atau pengembangan perilaku ekonomi produktif.

2) Menumbuh dan Mengembangkan Kelompok Usaha Bersama

KUBE sebagai model penumbuhkembangan usaha ekonomis produktif, dipolakan untuk memberdayakan usaha, peningkatan efisiensi, daya tahan maupun daya saing, serta memberikan kekuatan *bargaining* yang tinggi bagi fakir miskin penerima manfaat program.

3) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Mikro.

LKM dibangun dalam rangka memperkuat manajemen yang berfungsi untuk mendukung usaha ekonomi dari sisi pembiayaan, pengadaan bahan baku, pembinaan teknis produksi serta pemasaran produk. Kelembagaan LKM dipersiapkan sebagai *exit strategis* pasca program untuk menjamin kontinuitasnya.

4) Pengembangan dan Pemanfaatan Pendampingan Sosial.

Fakir miskin para penerima manfaat program pada umumnya tidak memiliki pengalaman yang cukup memadai untuk menciptakan dan mengembangkan suatu kegiatan usaha ekonomis yang produktif.. mereka perlu didampingi oleh tenaga profesional yang dapat merangsang, mengarahkan, membimbing dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi serta menghubungkan aktifitas mereka dengan sumber-sumber lain yang diperlukan.

5) Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat

Peran dan partisipasi masyarakat akan dilibatkan mulai tahap *need assessment*, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi. Lebih dari itu di harapkan sumbangan yang di berikan dapat secara menyeluruh dari segi tenaga, pemikiran, sarana/prasarana serta bila memungkinkan data.

Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.

d. Data dan Informasi

Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.

Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakup indikator-

indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.

Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.

Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan

antar wilayah, khususnya keterbandingan antar kabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.

Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Syahrudin Abbas selaku sekretaris yayasan Kartika Sejahtera bahwa ;

” Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.....”

Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen.

Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah,

instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program.

Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait, perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai.

Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk keperluan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bapak Ir. Wajar selaku sekretaris yayasan Taka Bonerate bahwa ;

”Perlu pembentukan tim teknis yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal maupun nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.....”

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten.

Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampu secara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota, serta kompromi ekologi yang meningkat.

2. Faktor Penghambat

Peran lembaga sosial/yayasan dalam melayani para penyandang masalah sosial dapat dikatakan masih sangat terbatas.. Oleh sebab itu struktur organisasinya juga masih sangat sederhana, yakni terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara dimana dalam melaksanakan kegiatan dibantu para anggota organisasi yang biasanya dari penduduk setempat. Didalam organisasi sosial tersebut belum diketemukan adanya unit yang memiliki tugas khusus untuk memberdayakan anggota atau sebagai unit usaha untuk menghidupi atau menggalang dana lembaga sosial atau sebagai sumber dana untuk keperluan operasional suatu organisasi.

Selain itu hasil temuan di dua yayasan / organisasi sosial sebagai sampel penelitian dapat terungkap bahwa:

a) Ketenagaan

Tenaga pelaksana dalam kepengurusan lembaga sosial/organisasi sosial sebagai sumberdaya yang potensial seharusnya yang berkualitas. Kualitas sumberdaya manusia (pengumpul data) hanya dapat dilihat dari status pendidikan formal maupun latihan-latihan keterampilan yang pernah diikuti. Kedua hal tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap pola berpikir, bertindak maupun mengaplikasikan segenap unsur-unsur yang terkandung dalam manajemen untuk pengelolaan lembaga sosial/organisasi sosial yang mereka kelola secara profesional.

Dilihat dari segi pendidikan pada umumnya tenaga pelaksana/ pengurus yayasan Taka Bonerate maupun yayasan Kartika Sejahtera cukup tinggi yaitu perguruan tinggi (strata 1) ke atas. Sedangkan untuk pendidikan non formal (pelatihan atau kursus keterampilan) semua pengurus lembaga sosial/organisasi sosial yang dijadikan sampel

penelitian mengatakan jarang mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial ataupun kursus ketrampilan.. Hal ini merupakan hambatan yang besar untuk kelangsungan dan dinamika kegiatan serta “produktivitas” suatu lembaga/organisasi sosial. Seperti yang dikatakan oleh Muhtar selaku ketua yayasan Taka Bonerate;

”Persoalan ketenagaan cukup menyulitkan bagi kami, karena pihak pengelola sulit untuk mendapatkan pegawai atau tenaga yang mempunyai tingkat kepedulian sosial yang tinggi.....”

Dengan demikian dari tinjauan ketenagaan yang berdasarkan pada intelektual, lembaga/ organisasi sosial kurang mempunyai peluang untuk maju dan sulit untuk berkembang, baik untuk pengelolaan maupun pelayanan lembaga/organisasi

b) Mekanisme Kerja Organisasi/Yayasan sosial.

Tatakelola organisasi merupakan variabel yang turut mempengaruhi kelangsungan hidup suatu lembaga sosial/organisasi sosial. Adapun tatakelola organisasi yang dimaksudkan disini adalah bagaimana pelaksanaan organisasi sosial tersebut mengaplikasikan segenap unsur yang terkandung di dalam manajemen untuk pengelolaan suatu organisasi.

Pada umumnya yayasan/organisasi sosial yang ada di lokasi penelitian menunjukkan adanya tatakelola yang belum mapan, artinya sebagian besar lembaga/organisasi belum memfungsikan unsur-unsur yang terkandung di dalam manajemen, seperti yang dikatakan oleh bapak Syahrudin Abbas selaku sekretaris yayasan Kartika Sejahtera bahwa;

”salah satu tugas kami sebagai tim pengelola adalah melaksanakan pengelolaan usaha ekonomi produktif. Agar

pengelolaan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana, maka harus mengikuti prinsip pengelolaan usaha, sementara kami sendiri sebagai pengelola belum pernah mendapatkan pelatihan yang seperti itu dari insatansi terkait.....”

Hal ini disebabkan karena unsur-unsur yang terkandung dalam manajemen tersebut merupakan konsekuensi logis untuk kelangsungan hidup dan pencapaian tujuan organisasi. Aplikasi dari unsur-unsur manajemen di dalam tatakelola organisasi sosial dapat dilihat dari:

1) Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Program

Dalam rangka perencanaan program, suatu lembaga/organisasi sosial harus melibatkan seluruh unsur yang ada dalam kepengurusan organisasi. Proses ini merupakan dukungan yang sangat besar bagi pelaksanaan kegiatan organisasi; sebab seluruh jajaran pelaksana akan lebih mengetahui kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota, disamping itu secara psikologis lebih bisa dirasakan eksistensi dirinya (pelaksana) di dalam kepengurusan. Kondisi semacam ini akan menumbuhkan semangat/motivasi yang tinggi di kalangan pengurus organisasi.

2) Laporan dan Evaluasi.

Laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan suatu organisasi, dan pelaksanaan laporan ini sebaiknya disusun/dibuat secara periodik, mingguan, bulanan atau triwulan/tahunan. Kenyataannya dilapangan penelitian bahwa laporan yang dibuat tidak periodik seperti yang disebutkan diatas. Inilah yang kemudian menjadi salah satu hambatan karena dalam laporan pengurus dapat melihat hambatan-hambatan yang dihadapi untuk kemudian di selesaikan secara bersama-sama. Laporan ini dibuat sebagai kewajiban pengurus kepada anggota/atau organisasinya yang

sebaiknya dilakukan secara bulanan, sedangkan cara penyampaian laporan dilakukan secara lisan maupun secara tertulis melalui pertemuan.

3) Pembinaan dan Pengendalian kegiatan suatu organisasi.

Pelaksanaan pengendalian organisasi pada umumnya dilakukan oleh ketua beserta sekretaris lembaga/organisasi sosial. Sedangkan untuk organisasi sosial khususnya yang memiliki induk organisasi biasanya dikendalikan oleh dewan pusat atau induk organisasi. Namun di wilayah ini organisasi yang ada masih terbatas pada organisasi sosial yang mempunyai daya jangkau hanya setingkat Kabupaten/Kota.

c) Pendanaan Organisasi Sosial

Dana merupakan salah satu komponen yang sangat dominan bagi pelaksanaan kegiatan suatu organisasi, artinya kemandirian suatu organisasi dapat dilihat dari segi pendanaan dan kontinuitas kegiatan. Logikanya, sebagian besar dari kegiatan selalu membutuhkan dana, sekalipun pelaksanaan kegiatan mempunyai motivasi dan pengabdian yang besar.

Ditinjau dari aspek pendanaan, kemandirian lembaga/organisasi sosial di wilayah ini dirasakan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan demikian, jika tidak ada bantuan organisasi akan mengalami kesulitan dalam menjaga kontinuitas kegiatan dan akibat yang lebih fatal adalah organisasi sosial tersebut tidak akan berjalan atau gulung tikar.

d) Pembinaan

Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan lembaga/ organisasi sosial yang ada di daerah dapat dilakukan oleh Dinas Sosial Propinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Pembinaan yang dapat diberikan kepada organisasi yang ada di wilayahnya dilakukan melalui pemberian pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Adapun materi yang dapat diberikan kepada organisasi sosial tersebut antara lain: (a) Menejemen Organisasi, (b) Profesi pekerjaan sosial dan (c) kewiraswastaan atau usaha ekonomi produktif.

Hasil penelitian di kedua yayasan menunjukkan bahwa pelatihan-pelatihan yang seperti disebutkan diatas tidak pernah diberikan oleh instansi terkait. Hal ini disampaikan oleh Drs. Muhtar,MM maupun Drs. Kamrin, M.Si menjelaskan kepada penulis tentang kurangnya pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan organisasi sosial sehingga para pengelola dalam menjalankan program pendampingan sosial senantiasa berdasarkan atas inisiatif dari pengurus itu sendiri. Mereka menganggap pelatihan ini menjadi sangat penting karena dengan pemberian pelatihan sesuai dengan yang telah diuraikan tersebut akan sangat besar manfaatnya bagi kelangsungan hidup suatu organisasi sosial. Selain itu menurut para pengurus pelatihan dengan materi kewiraswastaan juga dapat bermanfaat bagi pengurus organisasi sosial (yang dirasakan secara pribadi), terutama bagi pengurus yang memiliki usaha sendiri (seperti usaha mebiler dan perbengkelan).

Pembinaan yang dapat dilakukan oleh adalah penyuluhan, Tanya jawab, dan pengarahan melalui ceramah di dalam forum komunikasi organisasi sosial. Manfaat yang dapat dirasakan oleh sebuah organisasi sosial yang telah memanfaatkan dan mengikuti kegiatan forum adalah:

(a) organisasi sosial memperoleh informasi guna peningkatan kelangsungan hidup organisasi.; (b) Masing-masing organisasi sosial dapat saling memberikan informasi dan tukar pengalaman untuk perbaikan tata kelola organisasi. Namun demikian didalam penyelenggaraan forum komunikasi, organisasi yang ada di lokasi penelitian belum pernah mengikutinya dan bahkan organisasi yang ada belum mengadakan koordinasi antar organisasi sosial. Oleh karena itu dalam forum tersebut perlu adanya penyuluhan dan pengarahan untuk mengadakan koordinasi pelaksanaan kegiatan antar sesama organisasi.

D. Hasil Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen.

Bantuan kesejahteraan sosial permanen merupakan usaha pelayanan sosial berupa pemberian jaminan biaya hidup minimal bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) non potensial terlantar yang dilakukan secara berkelanjutan.

Bantuan ini diselenggarakan karena pemberian perlindungan sosial bagi PMKS non potensial melalui sistem panti dan non panti belum dapat menjangkau seluruh sasaran penyantunan yang ada.

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sasaran BKSP, sehingga dapat memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Selain usaha menciptakan sistem perekonomian yang sifatnya mendasar, perlu pula usaha yang sifatnya lebih pada pelaksanaan langsung dilapangan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat sesegera mungkin mengantisipasi keadaan sosial yang lebih memprihatinkan.

Bantuan sosial adalah bantuan bersifat sementara yang diberikan kepada keluarga fakir miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Berdasarkan hasil penelitian di kedua yayasan bantuan sosial yang diberikan berbentuk

bantuan santunan hidup, bantuan sarana usaha ekonomi produktif, atau bantuan sarana kelompok usaha bersama. Bantuan ini berupa bahan atau peralatan untuk menunjang usaha ekonomi produktif. Sesuai dengan asas kekeluargaan yang dianut, maka sarana usaha ekonomi produktif tersebut diberikan dan dikelola dalam sebuah kelompok usaha bersama yang berada dalam pembinaan pemerintah.

Tindak lanjut dari pemberian bantuan sosial adalah rehabilitasi sosial yang berfungsi sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan, untuk memungkinkan fakir miskin mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses rehabilitasi sosial ini, fakir miskin berhak untuk mendapatkan pembinaan kesadaran berbudaya, pembinaan mental, pembinaan fisik, pembinaan keterampilan, dan pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat. Fakir miskin yang telah selesai menjalani pembinaan diberikan bantuan permodalan oleh Depsos guna meningkatkan taraf kesejahteraannya.

2. Terlembaganya kegiatan penyantunan berbasis masyarakat.

Keterbatasan jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial dan penataan sistem pendataan, pelaporan dan jalur koordinasi di tingkat nasional dan daerah merupakan tantangan lain yang masih harus dihadapi. Tenaga lapangan yang terdidik, terlatih dan berkemampuan dalam pelaksanaan penanganan bidang kesejahteraan sosial dirasakan masih kurang. Selain itu, masih lemah pula jaringan kerja antara tenaga kerja sosial di masyarakat. Di sisi lain, keberadaan institusi sosial, dinas sosial/dinas kesejahteraan sosial, organisasi sosial (Orsos)/LSM di bidang kesejahteraan sosial, panti-panti sosial yang

berada dalam kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta membutuhkan peningkatan kapasitas, standarisasi dan suatu saat nanti perlu diakreditasi, sehingga profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan.

Begitupula dengan penyelenggaraannya menganut prinsip-prinsip jaminan sosial dengan tetap mengedepankan prinsip distribusi pendapatan (vertikal dan horisontal) dan solidaritas sosial antar kelompok dan antar generasi (sektor formal-informal, kaya-miskin, sehat-sakit, tua-muda, dewasa-anak). Dalam hal ini, badan penyelenggara jaminan sosial harus berorientasi untuk tidak mencari keuntungan.

Dengan demikian bantuan jaminan sosial seharusnya tidak dikelola oleh Perseroan Terbatas yang berorientasi mencari keuntungan. Melainkan oleh lembaga-lembaga sosial yang berbasis masyarakat dan melibatkan beragam pemangku kepentingan (stakeholders). Tokoh-tokoh terpercaya dari lembaga pemerintah pusat (Depsos) dan pemerintah lokal (Dinas Sosial), misalnya, dapat bekerjasama dengan Ornop (organisasi non-pemerintah/LSM) dan organisasi-organisasi serikat pekerja untuk terlibat dalam lembaga sosial yang berbasis masyarakat tersebut, pelatihan dan pengintegrasian di antara lembaga-lembaga ini perlu dilakukan sebelumnya untuk mencari platform dan strategi-strategi yang paling tepat.

3. Meningkatnya kepedulian sosial/kesetiakawanan sosial dari masyarakat khususnya dalam penanganan PMKS nonpotensial.

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial telah mendorong bergesernya paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dengan lebih mengedepankan peran aktif masyarakat baik secara perorangan maupun berkelompok melalui

pengembangan nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong yang dirumuskan sebagai modal sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat sekaligus sebagai perekat persatuan bangsa.

Upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat perlu terus dilakukan melalui pemberdayaan sosial dan aktualisasi nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong dalam rangka mewujudkan ketahanan sosial masyarakat. Kebutuhan pengembangan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, seperti kesetiakawanan sosial, kegotong royongan, keswadayaan masyarakat dan kelembagaan-kelembagaan sosial/organisasi sosial, perlu diperkuat dan difasilitasi oleh pemerintah agar ketahanan sosial masyarakat tetap terpelihara.

Pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada tahun 2006 dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai, diperkirakan akan menghasilkan berbagai jangkauan pelayanan dan pemberdayaan sosial yang lebih luas bagi anak dan balita terlantar, termasuk di dalamnya anak jalanan dan anak cacat, serta pemberian santunan bagi lanjut usia terlantar. Di samping itu, diperkirakan pula meningkatnya jumlah keluarga, fakir miskin dan PMKS lainnya yang diberdayakan, sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam hal kualitas perlindungan dan jaminan sosial, termasuk pengembangan sistemnya, diharapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Ke depan, permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi masih diwarnai dengan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterpencilan, korban tindak kekerasan, akibat bencana alam dan bencana sosial, penyalahgunaan napza, dan penyimpangan perilaku yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, permasalahan aktual yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial, kesenjangan sosial, perlu pula memperoleh perhatian dan penanganan yang serius.

Oleh karena itu, perlu merumuskan kembali makna solidaritas sosial diantara anggota masyarakat melalui peningkatan pemahaman mengenai perlunya membagi tanggungan dan manfaat jaminan sosial bagi kelompok-kelompok dan generasi-generasi yang berbeda.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pelayanan bantuan kesejahteraan sosial permanen di Kota Makassar (Kasus yayasan Taka Bonerate dan Yayasan Kartika Sejahtera) dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Organisasi pengelola Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen yayasan Taka Bonerate dan yayasan Kartika Sejahtera di Kota Makassar telah menjalankan fungsinya sebagai pendampingan sosial yang merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat miskin. Pendamping sosial hadir sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dari pengelolaan BKSP ini antara lain : a) Partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial dari masyarakat terhadap kewajiban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan sosial ini,, b) Transparansi. Langkah transparansi perlu segera dilakukan agar efisiensi bantuan dapat terjamin, c) Kebijakan dan strategi diarahkan pada upaya membangun daya para penerima manfaat program, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat ialah : a) Kualitas sumber daya manusia pengelola BKSP yang masih minim, b).

Mekanisme kerja / tata kelola organisasi atau yayasan yang belum mapan, c) pendanaan, kemandirian lembaga/organisasi sosial di wilayah ini dirasakan masih jauh dari yang diharapkan, d) Masih minimnya pembinaan yang dilakukan terhadap organisasi sosial ini.

3. Hasil yang diperoleh dari program bantuan kesejahteraan sosial permanen ini adalah ; a) Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sasaran BKSP, sehingga dapat memelihara taraf kesejahteraan sosial, b) Terlembaganya kegiatan penyantunan berbasis masyarakat, c) Meningkatnya kepedulian sosial/kesetiakawanan sosial dari masyarakat khususnya dalam penanganan PMKS nonpotensial.

B. Saran

- 1) Kendala utama yang dialami organisasi sosial di lokasi penelitian adalah faktor ketenagaan yang tidak memadai, baik dalam pendidikan maupun dalam keterpanggilan untuk pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu lembaga sosial yang ada perlu mendapatkan pembinaan dari pemerintah, yang sekaligus membentuk Unit usaha ekonomi produktif agar organisasi sosial tersebut memiliki pemasukan guna menunjang kelangsungan hidup organisasi. Dimana pelaksanaan pembinaan lembaga tersebut perlu adanya kerja sama antara Dinas Sosial dengan Dinas Perindustrian dan Koperasi agar lembaga sosial tersebut punya sumber dana yang dapat dikembangkan.
- 2) Perlu adanya penelitian yang mendetail mengenai identifikasi lembaga sosial yang ada, karena dengan identifikasi tersebut dapat diketahui kemandirian lembaga dalam pendanaan dan dapat diketahui kualitas sumber daya manusianya.
- 3) Isu tentang organisasi sosial/LSM perlu dikaitkan dengan wacana *civil society*, pembangunan demokrasi dan hak asasi manusia.

Sehubungan dengan itu, maka organisasi sosial perlu dipertimbangkan sebagai strategi dan titik masuk dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1994. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Usaha Kesejahteraan Sosial*, Direktorat Jendral Bina Bantuan Sosial; Departemen Sosial RI. Jakarta
- _____, 1994. *Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial*. Direktorat Jendral Bina Bantuan Sosial; Departemen Sosial RI. Jakarta
- _____, 2004, *Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No.40 Tahun 2004*, Fokusmedia, Jakarta
- Awangga, N Suryaputra, 2007, *Desain Penelitian ; Panduan tepat & lengkap membuat proposal penelitian*, Pyramid Publisher, Yogyakarta
- Departemen Sosial RI, *Masalah sosial di Indonesia, Tantangan dan Tanggapan*, Badan Pengembangan dan Pelatihan Sosial, Jakarta
- _____, 2005, *Panduan Manajemen BKSP*, Dirjen Banjamsos, Jakarta
- _____, *Pedoman Jaminan Sosial Lanjut Usia*, Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Jakarta
- _____, 2005, *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen*, Dirjen Banjamsos, Jakarta
- _____, *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Direktorat Jaminan Sosial, Jakarta
- _____, 2004, *Program Jaminan Sosial bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Askesos dan BKSP*, Dirjen Banjamsos, Jakarta
- _____, 2004, *Program Jaminan Sosial*, Dirjen Banjamsos, Jakarta
- _____, *Standar Pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen*, Dirjen Banjamsos, Jakarta
- Dewanta, A.S, (ed), 1995, *Kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media, Jakarta
- Fakih, Mansoer, 2000, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial (Pengolahan Ideologi LSM Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Gie, The Liang, 1992, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Rajawali Press, Jakarta
- Hanifah, Abu (et.all), 1995, *Penelitian Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan melalui Nilai Kesetiakawanan Sosial*, Balitbang Kesos, Depsos RI, Jakarta
- Kadar, Lailil, 1994, *Organisasi Manajemen*, Gramedia, Jakarta
- Kansil, C.S.T, 1990, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Kertonegoro, Sentanoe, 1982, *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta.
- Koetjaraningrat, 1977, *Sistem Gotong Royong dan Jiwa Tolong Menolong*. Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta
- _____, 1993, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Markus, Sudiby, 2002, "*Infrastruktur Sosial Masyarakat Tingkat Lokal sebagai Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat*", makalah disampaikan pada diskusi pembahasan konsep Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Cipayung 26 September 2002.
- Mas'ud, Mochtar, 1996, *Pembangunan Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Melalatoa, M. Junus, 1977, *Perwujudan Gotong Royong dalam Aktivitas Pertanian di Gayo*, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta
- Moenier, H.A.S, 1995, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Karsa, Jakarta
- Mubyarto, 1995, *Bantuan program IDT dan pemberdayaan masyarakat*, Aditya Media, Jakarta
- Mu'man Nuryana, 2002, "*Peranan Lembaga Sosial Komunitas dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di Indonesia*", makalah disampaikan pada diskusi pembahasan konsep Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Cipayung 26 September 2002.
- Ndraha, Talizhuduhu, 1987, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintah Desa*, Karya Darma, Jakarta
- Pamudji, S, 1990, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta

- Singarimbun, Masri, 1995, *Metode Penelitian Survey*, LP3 ES, Jakarta
- Soehartono, Irawan, 1995, *Metode Penelitian Sosial*, CV Rineka Cipta, Bandung
- Soetrisno, Loekman, 1997, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta
- Suryadi Culla, Adi 1999, *Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Tang, Mahmud, 1996, *Aneka ragam pengaturan sekuritas sosial di bekas kerajaan Barru, Sulawesi Selatan Indonesia*, Grafis Servicesentrum Van gils BV, Wageningen, Netherlands
- Tatang, M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1980, *Perencanaan Pembangunan*, cetakan ke-3, Gunung Agung, Jakarta
- _____, 1995, *Manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta